

2023

LAPORAN TAHUNAN

BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN
PASCAPANEN PERTANIAN



AGROSTANDAR

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Laporan Tahunan

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian 2023

Penyunting : Husnain, SP.,MP.,Ph.D
Prima Luna, STP, M.Si, Ph.D

Redaksi Pelaksana: Kun Tanti Dewandari, S.TP., M.Si
Tatiek Kartika Swara Mahardika, STP, M.Si
Masriska Hanum Suminaringati, S.A.

Penerbit: Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Jl. Tentara Pelajar No. 12
Telepon: 0251-8321762; Faksimili: 0251-8350920

Dicetak atas biaya DIPA BBPSI Pascapanen TA.2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Berkah dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan Balai Besar Pengujian Standar instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen) Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini merupakan laporan tahunan pertama setelah Balai Besar Litbang Pascapanen bertransformasi menjadi BBPSI pascapanen. Sebagai salah satu unit kerja di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, laporan ini disusun sebagai bahan pertanggung jawaban BBPSI Pascapanen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 1 (satu) tahun di bidang pengujian standar instrumen pascapanen pertanian yang mencakup pengelolaan keuangan, manajerial, program teknis, penyebarluasan hasil standarisasi dan beberapa capaian dari kegiatan strategis beserta hambatan dan tantangan yang dihadapi.

BBPSI Pascapanen juga telah melaksanakan sejumlah layanan berupa layanan pengujian analisis sampel di Laboratorium pengujian analisis sampel di Laboratorium, layanan penyusunan RSNI, layanan bimbingan teknis, layanan magang dan praktek kerja lapang (PKL), layanan informasi dan konsultasi/studi banding/kunjungan, dan layanan perpustakaan khusus standar pascapanen pertanian. Nilai indeks unit pelayanan BBPSI Pascapanen pada semester II TA.2023 mencapai nilai 3,59 dengan responden dari pelanggan layanan analisis uji laboratorium dan informasi teknologi yang terdiri dari Pelajar, Mahasiswa, Dosen, Wiraswasta, PNS, Pengusaha, dan lain-lain. Nilai indeks tersebut setara dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 85,484 yang berarti masuk kategori mutu pelayanan B atau kinerja unit pelayanan masuk kategori baik. Pada tahun 2023, terdapat dua indikator kinerja utama yang terkait dengan program dukungan manajemen di BBPSI Pascapanen berupa nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan nilai kinerja berdasarkan SMART/DJA. Untuk nilai ZI BBPSI Pascapanen yang dinilai oleh Tim assessment lingkup Balitbangtan mencapai nilai 89.28 dari target 81.5 Sedangkan nilai kinerja tahun 2023 tercapai 85,25 dari target 86,5.

Buku Laporan Tahunan BBPSI Pascapanen 2023 ini diharapkan menjadi sarana penyampaian informasi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan di BBPSI Pascapanen kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan tersebut

dapat terlaksana berkat kerja sama dan partisipasi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan laporan tahunan ini. Kami menyadari bahwa laporan tahunan ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat keterbatasan dalam penyajian informasi kegiatan. Oleh karena itu, kami terbuka atas segala kritik, masukan dan saran yang dapat meningkatkan kinerja BBPSI Pascapanen di tahun berikutnya. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan rujukan dalam menyusun rencana kerja pada tahun selanjutnya.

Plt. Kepala Balai Besar Pengujian Standar
Instrumen Pascapanen Pertanian



Husnain, S.P., M.P., Ph.D

NIP. 197309102001122001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	3
Daftar Isi	5
Daftar Gambar	7
Daftar Tabel	8
PENDAHULUAN	9
PROFIL BBPSI PASCAPANEN PERTANIAN	11
Struktur Organisasi	11
Sarana dan Prasarana	12
Sumber daya manusia	13
Pengembangan Kompetensi SDM	14
Realisasi anggaran	15
NILAI KINERJA SMART	19
KEGIATAN STRATEGIS	21
RANCANGAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN	21
RSNI Cabai Kering	21
RSNI Tepung Sagu	23
RSNI Daun Kelor	25
RSNI Karkas dan Daging Ayam Ras	26
LS PRO dan LPH Pascapanen	30
BSIP Pascapanen Pertanian melaksanakan pelatihan auditor untuk Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (LSPro)	31
Pelaksanaan Review Dokumen LPH BBPSI Pascapanen	32
Pelaksanaan Pelatihan Auditor Halal	35
Rekomendasi Kebijakan	36
Rekomendasi Kebijakan Pangan Strategis Sorgum di Kawasan Ex-RPIK	37
Kebijakan Penanganan Pascapanen di Kawasan Ex-RPIK Krisan Potong	38
Rekomendasi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan	41
INKUBATOR BISNIS	42
MANAJEMEN BBPSI PASCAPANEN PERTANIAN	47

PENERAPAN DAN PENYEBARLUASAN STANDAR.....	47
KERJA SAMA.....	47
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.....	47
Paten	51
Pekan Nasional (PENAS)	53
LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT	54
CODEX dan KOMITE TEKNIS	60
PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI	63
Evaluasi dan pelaporan	67
PENUTUP.....	71

Daftar Gambar

Gambar 1.Struktur Organisasi	11
Gambar 2.Nilai Kinerja SMART	16
Gambar 3.Alur Penyusunan RSNi	25
Gambar 4. Alur Proses Kegiatan Persiapan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	27
Gambar 5. Pelatihan Auditor untuk Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (LSPro)	28
Gambar 6. Review Dokumen LPH	29
Gambar 7. Struktur LPH BBPSI Pascapanen	30
Gambar 8. Struktur LSPro BBPSI Pascapanen	31
Gambar 9. Launching Inkubi BBPSI Pascapanen	41
Gambar 10. Kerjasama Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)	44
Gambar 11. kerjasama pengembangan biopellet di Indonesia dengan Green Building	45
Gambar 12. Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan Indonesia	48
Gambar 13. Seminar Hybrid Terkait Standar Mutu dan Keamanan Pangan	49
Gambar 14. Seminar penyebarluasan Informasi Standar Nasional Indonesia	50
Gambar 15. Public Hearing Standar Pelayanan Publik	51
Gambar 16. Kunjungan Delegasi Fiji ke BSIP Pascapanen	52
Gambar 17. Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Banten ke BSIP Pascapanen	53
Gambar 18. Kunjungan IPARA A Qualidade de Timor Leste	53
Gambar 19. Kegiatan Tour lab	54
Gambar 20. Sosialisasi SPI	61

Daftar Tabel

Tabel 1.Berdasarkan Jabatan Fungsional	12
Tabel 2.Berdasarkan jenjang pendidikan	13
Tabel 3.Revisi DIPA BBPSI Pascapanen	15
Tabel 4.Realisasi Anggaran	16
Tabel 5. Ruang lingkup RSNi Cabai Kering	19
Tabel 6. Ruang lingkup RSNi Pati Sagu	20
Tabel 7. Ruang lingkup RSNi Daun Kelor Kering	22
Tabel 8. Ruang lingkup RSNi Karkas dan daging ayam ras	24
Tabel 9. Pembahasan Draft RSNi	25
Tabel 10. Calon tenant Inkubator Bisnis	40
Tabel 11. Judul paten usulan BBPSI Pascapanen	46
Tabel 12.Sasaran dan Indikator Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian Tahun 2023	57
Tabel 13.Rincian kegiatan sinkronisasi dan koordinasi	58

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian menandakan lahirnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di Kementerian Pertanian. Disebutkan pada bagian kesembilan Pasal 29, BSIP memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Adapun, fungsi BSIP antara lain: a) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian; b) pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; d) pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun definisi pascapanen dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budiaya Pertanian Berkelanjutan adalah kegiatan penanganan hasil panen yang bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budi daya Pertanian.

Dalam UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, definisi standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, mengawasi, dan harmonisasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku Kepentingan. Sedangkan, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional dengan. Di tengah persaingan global saat ini, SPK bidang pertanian menjadi vital untuk memberikan jaminan kualitas dan keamanan pangan dalam rangka mendukung perdagangan adil dan perlindungan masyarakat. Tujuan akhir kegiatan SPK bidang pertanian adalah terwujudnya jaminan mutu hasil pertanian sesuai standar nasional (SNI), regional, maupun internasional. Dengan demikian, SPK dapat dipergunakan sebagai sarana dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Menurut data BPS tahun 2022 sektor pertanian berkontribusi sebesar 12,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau turun 0,88% dibanding tahun sebelumnya. Urutan kontribusi terbesar terhadap PDB tahun 2022 pada sub kategori pertanian yaitu tanaman perkebunan (3,76%), perikanan (2,58%), tanaman pangan (2,32%), peternakan

(1,52%), tanaman hortikultura (1,44%) kehutanan (0,60%), jasa pertanian dan perburuan (0,18%). Dengan potensi sub sektor pertanian tersebut, Program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian menjadi agenda penting yang diampu oleh BB PSI Pascapanen yaitu untuk meningkatnya kapasitas sumber daya pertanian dan daya saing produk pertanian. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) sebagai tuisi baru BSIP dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tersebut.

BBPSI Pascapanen merupakan unit organisasi yang membidangi masalah pascapanen dan hilirisasi pertanian serta memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian, dengan menyelenggarakan fungsi antara lain : penyusunan rencana program dan anggaran, pelayanan analisis dan pengujian, pengelolaan instrumen hasil standardisasi pascapanen pertanian, penyebarluasan hasil standar instrumen pascapanen pertanian serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian. merupakan unit organisasi yang membidangi masalah pascapanen dan hilirisasi pertanian.

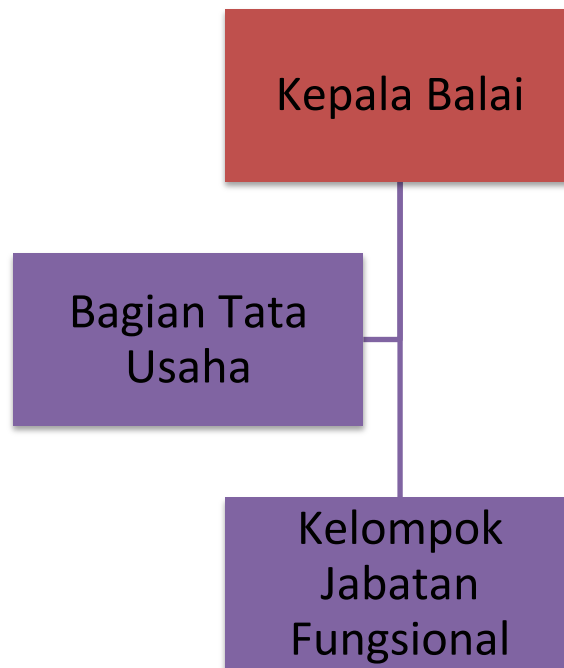
PROFIL BBPSI PASCAPANEN PERTANIAN

Struktur Organisasi

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, melaksanakan tugas untuk pengujian standar instrumen pascapanen pertanian dan menghasilkan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI). Pelaksanaan tugas BBPSI Pascapanen Pertanian diselenggarakan dengan beberapa fungsi diantaranya adalah melaksanakan analisis, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi produk, proses dan jasa (LSPro) serta pemeriksa halal (LPH), pengembangan serta penerapan standar pascapanen pertanian. BBPSI Pascapanen Pertanian Berlokasi di Jalan Tentara Pelajar no. 12, Cimanggu Kota Bogor dan didukung laboratorium mutu beras dan pascapanen serealialia di Jalan Surotokunto no 56 Rawa Gabus Karawang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPSI Pascapanen Pertanian didukung oleh personel yang profesional, kompeten dan dengan kualifikasi S1, S2, S3, yang terdiri dari Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Kebijakan, Analis Standardisasi, Analis Kepegawaian, Perencana, Pranata Humas, Pranata Keuangan, Pranata Komputer, Pustakawan, Arsiparis, Teknisi Litkayasa, serta Fungsional lainnya. Disamping itu, BBPSI Pascapanen Pertanian didukung oleh Auditor Halal tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, Majelis Ulama Indonesia, serta Petugas Pengambil Contoh (PPC) terlatih.

Berdasarkan fungsinya, BBPSI Pascapanen terus berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat dan negeri dengan memberikan 13 layanan. Untuk menunjang optimalisasi dan kualitas kinerja, BBPSI Pascapanen juga dilengkapi sarana dan prasarana berupa laboratorium yang terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. meliputi Laboratorium Kimia, Fisika, Nanoteknologi, Mikrobiologi berada di kota Bogor serta Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealialia yang berlokasi di Karawang. Laboratorium Mutu Beras Dan Pascapanen Serealialia yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010 dan menjadi Laboratorium Rujukan Pengujian Mutu Beras di Indonesia.



Gambar 1. Struktur Organisasi

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki BBPSI Pascapanen Pertanian berupa gedung perkantoran untuk kegiatan administratif dan gedung laboratorium yang berada di Bogor dan Karawang. Laboratorium BBPSI Pascapanen Pertanian yang berada di Bogor adalah Laboratorium Kimia, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Nanoteknologi, Laboratorium Fisik, Laboratorium Organoleptik, Laboratorium Pengolahan, Laboratorium Penanganan Segar, dan Laboratorium Pengembangan. Sedangkan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealia berlokasi di Karawang dan telah mendapat sertifikasi sebagai laboratorium rujukan (PUP/Penyelenggara Uji Profisiensi) dengan nomor sertifikat PUP-024 IDN. Laboratorium yang terdapat di BBPSI Pascapanen Pertanian berfungsi sebagai (i) fasilitas utama kegiatan standardisasi instrument pascapanen pertanian, (ii) laboratorium penguji/jasa analisis yang menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebagai bentuk optimalisasi aset negara untuk kepentingan pembangunan nasional, (iii) fasilitas pelatihan/bimbingan teknis atau layanan kunjungan dan studi banding, dan (iv) sebagai laboratorium rujukan. Beberapa laboratorium penelitian tersebut telah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium penguji terakreditasi yang mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2008. Beberapa peralatan yang terdapat di laboratorium tersebut antara lain HPLC, GC, spektrofotometer, amilograph, texture analyzer, dan lain-lain. Sedangkan

laboratorium pengolahan menangani diantaranya pengolahan roti-rotian dan mie, pengolahan minuman, ekstraksi atsiri dan bahan aktif, pengolahan daging, susu, bioprosesing dan pengemasan produk. Laboratorium penanganan bahan termasuk penanganan segar komoditas tanaman pangan (serealia dan umbi-umbian), hortikultura (buah, sayuran, dan biofarmaka), dan peternakan (daging, susu dan telur), serta aneka tepung. Beberapa peralatan di laboratorium pengembangan tersebut antara lain ekstraktor minyak atsiri, peralatan pengeringan (spray drier, molen drier, far infra red drier), mesin penepungan, penyosoh sorgum, mesin pascapanen padi terpadu, peralatan pengolahan roti dan mie, alat pengemas, dan sebagainya.

BBPSI Pascapanen Pertanian juga memiliki sarana perpustakaan sekaligus sebagai tempat promosi hasil pengembangan inkubator bisnis pascapanen pertanian dalam mempercepat adopsi dan hilirisasi teknologi pascapanen pertanian yang telah dihasilkan. Keseluruhan aset laboratorium tersebut masih menjadi aset BBPSI Pascapanen Pertanian, karena kegiatan pengujian di laboratorium merupakan *core bussines* utama di BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai organisasi yang menjalankan fungsi standardisasi.

Sumber daya manusia

SDM merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung kinerja suatu instansi. Agar program kegiatan dapat terlaksana dengan baik, diperlukan sistem manajemen dengan membentuk struktur organisasi yang bertanggung jawab melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPSI Pascapanen didukung oleh 88 Komposisi jumlah tenaga fungsional tertentu sebanyak jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian (8 orang), teknisi litkayasa (18 orang), arsiparis (2 orang), pustakawan (1 orang), pranata komputer (2 orang), pranata humas (4 orang), analis kepegawaian (1 orang), analis pengelolaan keuangan APBN (2 orang), analis kebijakan (3 orang), perencana (1 orang), pranata keuangan APBN (2 orang). Selebihnya merupakan fungsional umum sejumlah 44 orang. Komposisi SDM menurut jabatannya di masing-masing UK/UPT sebagaimana disajikan berikut ini

Tabel 1. Berdasarkan Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional	Jumlah pegawai
pengawas mutu hasil pertanian	8
teknisi litkayasa	18
arsiparis	2

Jabatan fungsional	Jumlah pegawai
pustakawan	1
pranata komputer	2
pranata humas	4
analisis kepegawaian	1
analisis pengelolaan keuangan APBN	2
analisis kebijakan	3
perencana	1
pranata keuangan APBN	2
fungsional umum	44
Total	88

Tabel 2. Berdasarkan jenjang pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah pegawai
S3	3
S2	24
S1	16
Lainnya	45
Total	88

Pengembangan Kompetensi SDM

Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi diperlukan dalam peningkatan mutu, profesionalisme, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok fungsi masing masing pegawai. Tahun 2023 beberapa pegawai BBPSI Pascapanen telah mengikuti Diklat. Daftar Diklat Jangka Pendek sebagai berikut :

1. Pelatihan Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi Produk bertempat di BBPSI Pascapanen Badan Standardisasi Nasional dilaksanakan tanggal 6-8 Juni 2023 sebanyak 25 Orang Tim LSPro
2. Pelatihan Penyusunan Dokumentasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa Berdasarkan SNI /ISO IEC 17065:2012 dilaksanakan tanggal 20-22 Juni 2023 dengan peserta 25 Orang Tim LSPro
3. Training dan Uji Kompetensi Auditor Halal di LSP MUI pada 12 Juli 2023 dengan peserta sebanyak 6 orang

4. UHPLC Workshop: Partnership Program on Food Analysis Indonesia, di IPB, tanggal 24-28 Juli 2023, sebanyak 6 personel LPK (Analisis)
5. Pelatihan PPC, di BBPSI Pascapanen & BULOG Karawang, tanggal 9-11 Agustus, peserta sebanyak 28 Personel LPK
6. Pelatihan audit internal SNI 17025:2017, bertempat di Yogyakarta, tanggal 30 Oktober-1 November 2023, sebanyak 8 Personel LPK
7. Pelatihan SNI ISO/IEC 22000:2018, bertempat di BBPSI Pascapanen, 31 Oktober – 1 November 2023, sebanyak 28 Personel LPK
8. Pelatihan Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Lingkup Lab Kimia, bertempat di BBPSI Pascapanen, 8 November 2023, sebanyak 30 Personel LPK
9. Pelatihan kalibrasi suhu dan massa, bertempat di BBSPJIA, 8-9 November 2023, sebanyak 2 Personel LPK
10. Pelatihan auditor LSPro 17065, bertempat di BBPSI Pascapanen, 25-29 November 2023, sebanyak 28 Personel LSPro
11. Pelatihan Sertifikasi Pertanian Organik, bertempat di BBPSI Pascapanen, 14 Desember 2023, sebanyak 20 Personel LPK
12. Pelatihan pemahaman SNI 17043:2023, bertempat di BBPSI Pascapanen, 20 Desember 2023, sebanyak 25 Personel LPK

Realisasi anggaran

Balai Besar Pengujian Standarisasi Instrumen Pascapanen Pertanian sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-018.09.2.648669/2023, alokasi anggaran belanja tahun 2023 Balai Besar Standar Instrumen Pascapanen Pertanian adalah sebesar Rp. 16.465.917.000 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Selama TA. 2023, sampai dengan akhir Desember 2023, DIPA BBPSI Pascapanen mengalami revisi sebanyak 13 kali. Revisi pertama dilakukan dalam rangka pembukaan blokir pada KRO Layanan Perkantoran yaitu RO Gaji dan Tunjangan senilai Rp7.447.444.000,- dan RO Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Rp6.829.000.000,-. Dokumen revisi DIPA 1 terbit pada tanggal 26 Desember 2022. Revisi kedua dilakukan sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden nomor 117 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian yang kemudian diikuti terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 yang diterjemahkan ke dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), maka dilakukan pembukaan blokir dalam rangka pelaksanaan

kegiatan. Dokumen DIPA Revisi 2 senilai Rp20.315.917.000,00,- terbit pada tanggal 10 April 2023.

Revisi ketiga dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil RDP bersama Komisi 4 DPR RI dimana usulan Kementan untuk melakukan realokasi eksternal dan penyesuaian automatic adjusment disetujui oleh Komisi 4, dengan mendapatkan alokasi tambahan sebesar 50 Milyar. Besaran 50 Milyar dari surat Menteri Pertanian dan Komisi 4 untuk Program Teknis Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar 40 Milyar sebagai wadah produk instrumen terstandar termasuk produksi dan perbanyakan benih tanaman bibit hewan terstandar dan 10 Milyar ditujukan untuk Program Dukungan Manajemen. Anggaran tambahan Program Dukungan Manajemen sebesar 10 Milyar untuk menjawab penugasan Kementan bahwa BSIP sebagai penanggungjawab pelaksanaan Gelar Teknologi (PENAS) yang sebelumnya belum dialokasikan. BBPSI Pascapanen Pertanian dalam hal ini mendapatkan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 untuk kegiatan pendampingan PENAS pada Program Dukungan Manajemen.. Tambahan anggaran tersebut mengubah pagu anggaran di BBPSI Pascapanen Pertanian menjadi Rp20.415.917.000,00,- pada dokumen DIPA Revisi 3 yang terbit pada tanggal 15 April 2023. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2023 terjadi revisi 4 terkait dengan rencana penarikan dana (RPD) pada aplikasi SAKTI, sehingga pada dokumen DIPA Revisi 4 anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian masih senilai Rp20.415.917.000,00,-. Revisi 5 pada tanggal 29 Mei 2023 terjadi pergeseran pada detil di RKAKL yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran/belanja, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta memperkuat pencapaian output, dengan jumlah anggaran masih sama.

Revisi keenam dilakukan pergeseran pada detil di RKAKL yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran/belanja, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta memperkuat pencapaian output. Dokumen DIPA Revisi 6 dengan nilai anggaran tetap, terbit pada tanggal 14 Juli 2023. Revisi anggaran ketujuh dilakukan karena pergeseran pada detil di RKAKL yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran/belanja, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta memperkuat pencapaian output. Dokumen DIPA Revisi 7 dengan nilai anggaran tetap, terbit pada tanggal 10 Agustus 2023.

Revisi 8 dilakukan karena adanya pergeseran pada detil di RKAKL yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran/belanja, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta memperkuat pencapaian output. Dokumen DIPA Revisi 8 terbit pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan nilai anggaran tidak berubah. Revisi 9 dilakukan karena adanya realokasi gaji dan tunjangan ke BA BUN, serta pengurangan pagu gaji dan tunjangan menjadi Rp9.808.292.000,- yang angkanya sudah diubah pada saat revisi 8, namun pengajuannya harus terpisah, sehingga pagu pada akhir bulan Desember 2022 menjadi Rp19.968.589.000,-, sesuai Dokumen Revisi DIPA ke 9 yang terbit pada tanggal 10

Desember 2022. Revisi 9 terjadi karena realokasi belanja gaji dan tunjangan terkait rincian perhitungan kebutuhan pegawai yaitu peralihan pegawai yang pindah ke BRIN dengan adanya transformasi. Realokasi belanja gaji dan pegawai akan digunakan untuk belanja lainnya yaitu usulan anggaran pada Program Dukungan Manajemen pada RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Dokumen revisi DIPA ke-9 yang terbit pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan pengurangan jumlah anggaran menjadi Rp19.130.275.000,-. Revisi 10 terkait refocusing selain untuk pelaksanaan upsus mendukung upaya percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung, juga adanya refocusing pada sub komponen pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Dokumen revisi DIPA ke-10 terbit pada tanggal 24 November 2023 dengan pengurangan anggaran di BBPSI Pascapanen Pertanian menjadi Rp18.477.978.000,-.

Revisi 11 terjadi karena ada penambahan pada RO Layanan Perkantoran sub komponen belanja gaji dan tunjangan terkait rincian perhitungan kebutuhan kenaikan pangkat pegawai dan diangkatnya 1 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang direkrut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Besaran penambahan anggaran pada sub komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp25.000.000,-. Dokumen revisi DIPA ke-11 terbit pada tanggal 1 Desember 2023 dengan jumlah anggaran menjadi Rp18.477.978.000,-. Revisi 12 merupakan Revisi DIPA/POK terkait Pendapatan Negara Non Pajak (PNBP) berdasarkan hasil penelaahan usulan revisi anggaran TA. 2023 serta menindaklanjuti surat Kepala BSIP Kementan nomor B-1906/RC.110/H/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, antara Sekretariat BSIP, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementan, Biro Keuangan dan BMN, dan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Revisi anggaran berupa revisi administrasi dan revisi pagu anggaran berubah terkait dengan penghapusan catatan halaman IV A DIPA (blokir) dan pengurangan pagu belanja yang bersumber dari PNBP. Dokumen revisi DIPA ke-12 terbit pada tanggal 19 Desember 2023 dengan jumlah anggaran menjadi Rp17.288.505.000,-. Revisi 13 dilakukan sebagaimana usulan melalui surat nomor B-2238/RC.140/H/10/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 dalam rangka penambahan pagu DIPA sehubungan dengan penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga yang telah dihitung dan dialokasikan sesuai dengan standar biaya dan peruntukannya. Dokumen revisi DIPA ke-13 terbit pada tanggal 28 Desember 2023, sehingga jumlah pagu anggaran BBPSI Pascapanen di akhir Desember senilai Rp17.773.846.000,-.

Tabel 3.Revisi DIPA BBPSI Pascapanen

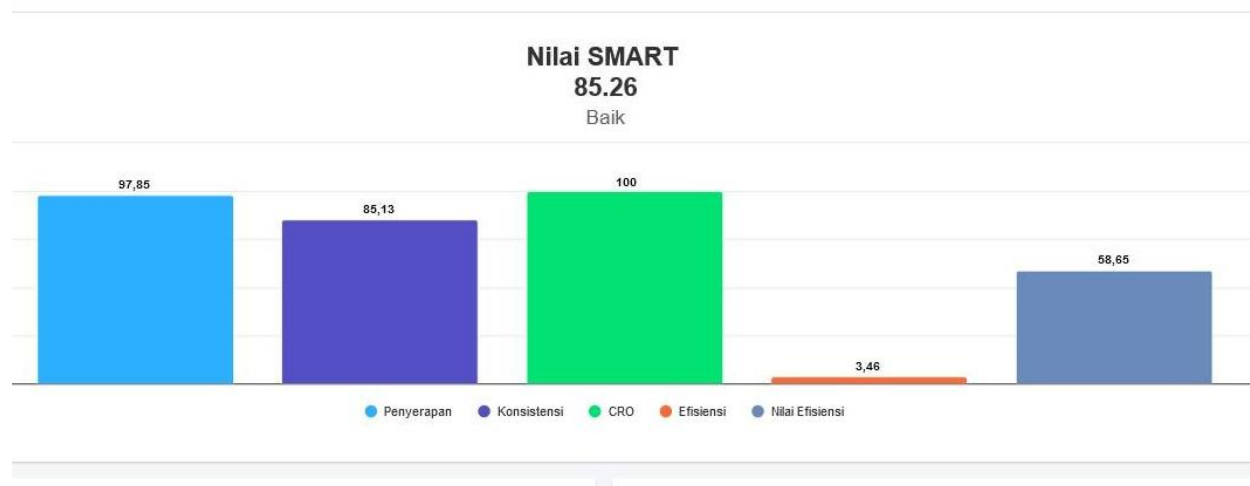
No.	Uraian	Pagu Alokasi Anggaran	Terbit	Keterangan
1.	DIPA/POK TA. 2023	Rp16.465.917.000,00	30 Nopember 2022	Pagu Alokasi Anggaran
2.	DIPA/POK Revisi 1	Rp16.465.917.000,00	26 Desember 2022	Buka Blokir 001 dan 002
3.	DIPA/POK Revisi 2	Rp20.315.917.000,00	10 April 2023	Buka Blokir Program Teknis
4.	DIPA/POK Revisi 3	Rp20.415.917.000,00	15 April 2023	Penambahan Anggaran Rp100.000.000,00 pada Program Dukman subkomponen Pendampingan PENAS
5.	DIPA/POK Revisi 4	Rp20.415.917.000,00	3 Mei 2023	Rencana penarikan dana (RPD) pada aplikasi SAKTI, yang dituangkan dalam halaman III DIPA
6.	DIPA/POK Revisi 5	Rp20.415.917.000,00	29 Mei 2023	Pergeseran pada detil (akun) di RKAKL
7.	DIPA/POK Revisi 6	Rp20.415.917.000,00	14 Juli 2023	Pergeseran pada detil (akun) di RKAKL
8.	DIPA/POK Revisi 7	Rp20.415.917.000,00	10 Agustus 2023	Pergeseran pada detil (akun) di RKAKL
9.	DIPA/POK Revisi 8	Rp20.415.917.000,00	16 Oktober 2023	Pergeseran pada detil (akun) di RKAKL
10.	DIPA/POK Revisi 9	Rp19.130.275.000,00	31 Oktober 2023	Realokasi 001
11.	DIPA/POK Revisi 10	Rp18.452.978.000,00	24 November 2023	Refocusing, blokir 240juta
12.	DIPA/POK Revisi 11	Rp20.477.978.000,00	1 Desember 2023	Penambahan anggaran 001
13.	DIPA/POK Revisi 12	Rp 17.288.505.000	19 Desember 2023	PNBP
14.	DIPA/POK Revisi 13	Rp 17.733.846.000	28 Desember 2023	Alokasi Dana Hibah

Tabel 4.Realisasi Anggaran

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi SP2D s.d 7 Januari 2024	
		Rp	%
Belanja pegawai	6.036.802.000	6.005.884.941	99.49
Belanja barang	11.515.018.000	11.163.080.316	96.94
Belanja modal	222.026.000	222.026.000	100
TOTAL	17.733.846.000	17.390.991.257	97.85

NILAI KINERJA SMART

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas yang dipublikasikan menggunakan aplikasi online SMART DJA.



Gambar 2.Nilai Kinerja SMART

Sampai dengan 23 Januari 2023, capaian nilai SMART BSIP Pascapanen adalah 85.26 (kategori Baik), dengan rincian: penyerapan anggaran sebesar 97.85%, konsistensi RPD (Rencana Penarikan Dana) sebesar 85.13%, capaian realisasi output (CRO) telah mencapai 100 %, efisiensi sebesar 3.46% dan nilai efisiensi sebesar 58.65%.

KEGIATAN STRATEGIS

RANCANGAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

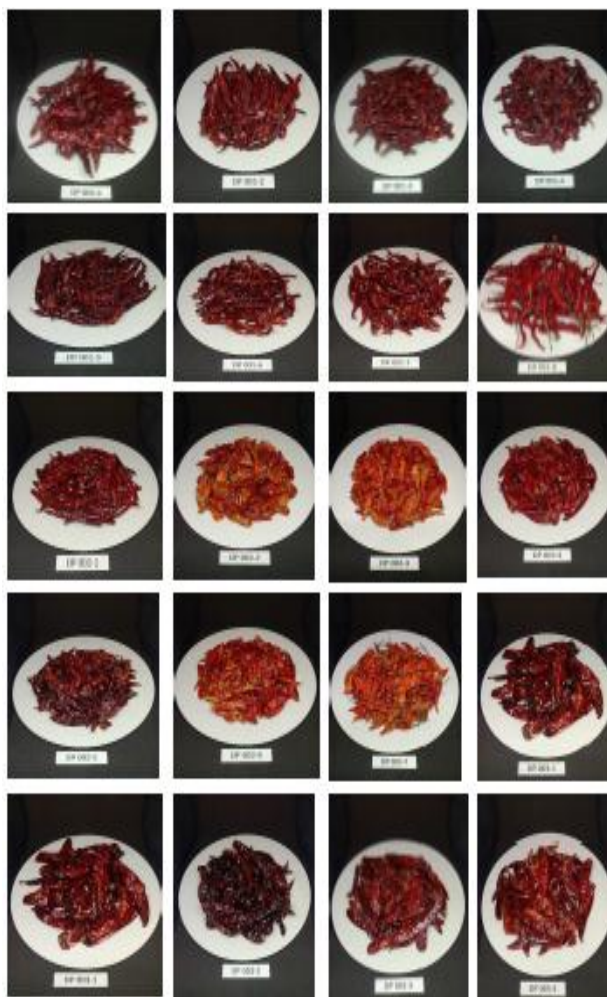
Standar instrumen pertanian sangat diperlukan demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Penerapan standar yang baik, akan mendorong potensi pertanian Indonesia mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Keluaran yang diharapkan pada kegiatan ini yaitu dihasilkannya konsep revisi RSNi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru namun telah diawali dengan koordinasi dan survei lapang secara terbatas untuk mengumpulkan informasi. Untuk mencapai keluaran tersebut dilakukan tahapan kegiatan, antara lain: 1) Koordinasi dengan komite teknis, stakeholder dan pihak terkait dalam penyusunan/revisi konsep RSNi, 2) Survei lokasi dan pengambilan sampel, 3) Melakukan pengujian dan 4) Penyusunan draft RSNi melalui konsensus dengan seluruh pihak terkait dan 5) Pelaporan.

Selama tahun 2023 BSIP Pascapanen dengan kolaborasi antara tim konseptor dan Komite Teknis terkait telah berhasil menyusun 4 (empat) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNi) dan menyerahkan dokumen RSNi 3 kepada BSN untuk diproses lebih lanjut hingga ditetapkan sebagai SNI yang siap disebarluaskan ke masyarakat dan *stakeholder* terkait. Keempat RSNi yang telah diajukan antara lain, 1) RSNi 3389:2023 Cabai kering; 2) RSNi 3729:2023 Pati Sagu; 3) RSNi 9228:2023 Daun Kelor Kering; dan 4) RSNi 3924:2023 Karkas dan Daging Ayam Ras.

RSNi Cabai Kering

Saat ini cabai kering yang beredar di pasaran masih sangat beragam mutunya. Berdasarkan hasil survei belum ada persyaratan yang jelas. Saat ini hanya Good Handling Practices (GHP) dan Good Agricultural Practices (GAP) merupakan sertifikasi yang digunakan sebagai syarat impor. Meskipun belum ada kasus keamanan pangan terkait cabai kering impor yang ada dipasaran langkah ini sekaligus dapat membantu petani bahkan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas standar cabai kering.

SNI yang relevan saat ini sangat diperlukan sebagai barrier masuknya cabai kering impor ke Indonesia sebagai pedoman dan dasar dilakukan pengawasan agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu dan juga alasan keamanan pangan. Sementara itu acuan standar yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3389-1994:Lombok kering, persyaratan mutu dan kualitas lombok kering cukup sederhana dan terlalu umum belum mempersyaratkan tentang keamanan pangan, tingkat keseragaman warna dan pengkelasan. Sesuai peraturan Badan Standar Nasional Indonesia, mendesak perlu dilakukan segera dilakukan revisi terhadap SNI tersebut.



Koordinasi dengan berbagai stakeholder telah dilakukan, antara lain dengan Komtek 65-15 Hortikultura, regulator yang diwakili oleh bidang usaha perdagangan di PD Pasar Jaya - Pasar Kramatjati (Jakarta) dan Pasar Caringin (Bandung), produsen oleh Koperasi Eptilu (Garut), PT. Agro Zee Annur (Nusa Tenggara Barat) dan CV. Chilia (Grobogan, Jawa Tengah). Selain itu juga tim pakar yang terdiri dari peneliti BRIN dan Dosen, Balai Penerap Standar Komoditas Sayuran Lembang yang memiliki kompetensi mengenai cabai kering. Para stakeholder menjadi pertimbangan dalam menetapkan parameter teknis yang harus diakomodasi di dalam standar.

Kegiatan koordinasi dilakukan bersama dengan survei lokasi dan pengambilan

sampel cabai kering. Lokasi pengambilan sampel sesuai lokasi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah. Lokasi tersebut atas rekomendasi dari Dirjen Hortikultura dimana beberapa lokasi telah diberikan bantuan alsin pengering cabai (solar dryer) dengan kapasitas mencapai 500 kg hingga 1 ton. Cabai yang dijadikan sampel kemudian dilakukan pengujian. Pengujian sampel dilakukan berdasarkan persyaratan mutu yg telah ada dan sebagai pendukung data dan rekomendasi dalam penyusunan revisi RSNi cabai kering seperti kontaminasi mikroba dan kapang, bahan tambahan pangan dan toksin pada cabai kering, cemaran pestisida, cemaran logam berat, etilen oksida dan cemaran kimia (sulfit). Pengembangan metode cara uji dilakukan pada tahapan ini.

Kegiatan revisi RSNi cabai kering menetapkan target memperoleh RSNi 3 dan telah dicapai melalui rapat koordinasi berbagai pihak yang terlibat dan rapat teknis serta rapat konsensus berkolaborasi dengan komtek 65-15 Hortikultura. Realisasi dan target disesuaikan dengan anggaran. Pelaku usaha sebagai calon penerima manfaat sejak awal kegiatan ini telah dilibatkan. Kegiatan ini sudah sampai pada rapat konsensus dan jajak pendapat yang menghasilkan RSNi4 dan sudah ditetapkan menjadi SNI 3389: 2023 melalui SK Kepala BSN Nomer 681/KEP/BSN/12/2023

Tabel 5. Ruang lingkup RSNi Cabai Kering

Judul SNI	Cabai Kering
Alasan diperlukan SNI	• SNI cabai kering sudah <i>out of date</i> perlu direvisi • Sesuai peraturan BSN No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang SNI setiap 5 tahun • SNI cabai kering disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan iptek menuju globalisasi
Ruang Lingkup	Standar ini berlaku untuk cabai kering utuh yang berasal dari <i>Capsicum annuum</i> (keriting, besar) atau <i>Capsicum frutescens</i> (rawit) dari famili <i>Solanaceae</i> untuk bahan dalam olahan pangan, pengemasan ulang atau kebutuhan industri. Standar ini menetapkan klasifikasi, persyaratan mutu, pengemasan, pelabelan, higienitas, metode pengambilan contoh, metode uji, dan syarat lulus uji.

RSNI Tepung Sagu



Sagu (*Metroxylon sp.*) merupakan komoditas perkebunan yang potensial dan Indonesia merupakan negara penghasil sagu terbesar di dunia karena 60 persen bahan pangan itu ada di Indonesia. Sagu (*Metroxylon sp.*) merupakan komoditas pertanian yang berpotensi sebagai sumber karbohidrat (BB Pascapanen, 2021). Kadar karbohidrat sagu hampir sama dengan kadar karbohidrat yang terdapat pada tepung beras, singkong, dan kentang. Selain itu, sagu dapat digunakan untuk bahan baku agroindustri seperti halnya pati dari tumbuhan pangan lainnya. Saat ini terdapat 4 varietas sagu unggul di Indonesia yaitu sagu Molat dari Maluku tahun 2010, sagu Selat Panjang Meranti tahun 2013, sagu Bestari

dari Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017, sagu Tanah Luwu tahun 2022 dan sagu Papua. Berdasarkan data BPS dan DITJENBUN, pada tahun 2019 ekspor sagu Indonesia berkontribusi sebesar 0,10% terhadap total ekspor pertanian Indonesia dengan nilai ekspor sagu pada tahun 2019 sebesar US\$ 3.276.000 dan total nilai ekspor pertanian Indonesia tahun 2019 sebesar US\$ 3.612.000.000. Selain volume dan nilai ekspor yang cenderung meningkat, prospek pemasaran sagu ke depan juga diprediksi cukup baik. Selain itu pertumbuhan konsumsi sagu di dunia dari tahun ke tahun juga cukup besar.

Melihat prospek perkembangan tepung sagu di pasaran, SNI 3727 : 2008 tentang tepung sagu yang umurnya sudah lebih dari lima tahun, sudah saatnya direvisi untuk mengikuti kebutuhan pasar serta perkembangan inovasi dan teknologi. Revisi dilakukan untuk penyesuaian terhadap aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan fungsi pelestarian lingkungan dalam pengelolaan dan pengembangan tepung sagu. Agar perumusan SNI sesuai kebutuhan para stakeholder, perlu diketahui kualitas bahan baku yang dipergunakan, alur proses produksinya dan produk yang dihasilkan, maka masukan dari stakeholder sangat dibutuhkan dalam perumusan SNI komoditas tersebut. Untuk menindaklanjuti kebutuhan diatas, telah diusulan revisi SNI 3727 : 2008 melalui PNPS tahun 2023 ke BSN.

Kegiatan ini dilakukan selama satu tahun, yaitu tahun 2023. Kegiatan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu dilakukan survei dan koordinasi dengan stakeholder terkait (industri, pelaku usaha, asosiasi, eksportir, direktorat teknis, masyarakat luas). Selanjutnya, dilakukan kegiatan pengambilan sampel, pengujian sampel, dan penyusunan RSNI. Pada akhir tahun kegiatan, keluaran yang dihasilkan adalah RSNI 3 Tepung Sagu. Kegiatan ini sudah sampai pada rapat konsensus dan jajak pendapat yang menghasilkan RSNI4 dan sedang menunggu proses penetapan oleh BSN.

Tabel 6. Ruang lingkup RSNI Pati Sagu

Judul SNI Pati Sagu	
Alasan diperlukan SNI	a. Sagu merupakan komoditas perkebunan yang potensial di Indonesia b. SNI Pati sagu sudah out of date sehingga perlu direvisi sesuai dengan Peraturan BSN No.6 Tahun 2018 c. Untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan pati sagu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi
Ruang Lingkup	Standar ini menetapkan acuan normatif, istilah dan definisi, bahan, klasifikasi, syarat mutu, pengambilan contoh cara uji, higiene,

Judul SNI	Pati Sagu
	pengemasan dan penandaan untuk pati sagu.

RSNI Daun Kelor

Pohon kelor merupakan tanaman tropis, sehingga mudah tumbuh di Indonesia dan banyak dijumpai sebagai pagar rumah secara tradisional ataupun tanaman pembatas kebun karena kemudahan budidayanya serta ketahanannya selama musim kemarau (Becker, 2003). Jadi wajar bila dikatakan bahwa masyarakat kita sudah tidak asing lagi dengan tanaman yang satu ini, bahkan sangat terkenal. Di beberapa daerah, daun kelor dikenal dengan nama yang berbeda yaitu Kelor (Indonesia, Jawa, Sunda, Bali, Lampung), Kerol (Buru); Marangghi (Madura), Moltong (Flores), Kelo (Gorontalo); Keloro (Bugis), Kawano (Sumba), Ongge (Bima); Hau fo (Timor).

Di luar negeri, kelor sangat diminati untuk dikonsumsi maupun untuk bahan baku industri. Selain dianggap pohon ajaib, juga merupakan superfood untuk meningkatkan imunitas, detoks, serta kandungan vitamin dan mineralnya yang bagus bagi tubuh. CV Tri Utami Jaya yang ada di Mataram telah aktif melakukan perdagangan kelor ke berbagai negara. Tercatat ada 30 negara yang menjadi tujuan pengiriman produk mereka, seperti Singapura dan Malaysia, Hong Kong, China, Australia, hingga Amerika Serikat, negara-negara Timur Tengah dan Eropa seperti Perancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris (Nikson Sinaga dkk, 2022). Meningkatnya perdagangan dan pemanfaatan kelor memerlukan standar maupun regulasi untuk mendukung perdagangan yang menguntungkan konsumen dan produsen. Adanya permintaan dari stake holder dan asosiasi terkait pentingnya standar kelor sehingga perlu untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pembahasan RSNI daun kelor kering sebagai bahan baku. Pelaku usaha dan petani dapat menghasilkan daun kelor kering yang bermutu dan terstandar sehingga dapat berdaya saing dan meningkatkan nilai tambah daun kelor.

Kegiatan perumusan RSNI ini diawali dengan koordinasi, desk study, dan diskusi dengan pihak terkait, komtek perkebunan, pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk mendapat masukan terkait RSNI. Selain itu untuk memverifikasi data yang diperlukan dalam RSNI akan dilakukan pengujian laboratorium, dengan sampel uji dari berbagai lokasi sentra seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang dilanjutkan dengan pengujian sampel sesuai dengan parameter mutu yang akan diuji. Selanjutnya dilakukan penyusunan draft RSNI dilanjutkan dengan FGD, rapat teknis, rapat konsensus hingga diperoleh RSNI3.

Kegiatan ini menghasilkan RSNI 3 dan disampaikan ke BSN untuk ditetapkan sebagai SNI baru. Pada akhir tahun kegiatan telah menghasilkan RSNI3 dan sudah

dilakukan Jajak Pendapat pada tanggal 11 November 2023 hingga 10 Desember 2023. Dengan adanya SNI diharapkan dapat membentengi produk dalam negeri dari serbuan produk impor dan menghindari pertentangan dalam perdagangan internasional. RSNi ini sudah ditetapkan menjadi SNI 9228:2023 melalui SK Kepala BSN nomer 688/KEP/BSN/12/2023.

Tabel 7. Ruang lingkup RSNi Daun Kelor Kering

Judul SNI	Daun Kelor (<i>Moringa oleifera</i>) Kering
Alasan diperlukan SNI	a. Pemanfaatan daun kelor sudah sangat luas baik dalam bentuk segar maupun olahan. Pasar kelor sangat potensial dan berkembang sebagai salah satu komoditas ekspor. Selama ini persyaratan terkait daun maupun bubuk kelor belum ada baik terkait SNI maupun standar penanganan dan pengolahannya. Oleh karena itu diperlukan standardisasi terkait daun dan bubuk kelor sehingga menjamin produsen maupun konsumen dalam pemanfaatannya. b. Meningkatnya perdagangan dan pemanfaatan kelor memerlukan standar maupun regulasi untuk mendukung perdagangan yang menguntungkan konsumen dan produsen. c. Adanya permintaan dari stake holder dan asosiasi (Asosiasi Beyond Moringa Indonesia) tentang pentingnya standar kelor untuk perdagangan ke depan.
Ruang Lingkup	Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengemasan dan penandaan untuk daun kelor kering. Standar ini tidak berlaku untuk tepung daun kelor.

RSNI Karkas dan Daging Ayam Ras

Daging ayam tergolong sebagai sumber protein hewani yang relatif murah dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Komposisi kimia daging ayam (rasa) mencakup kadar air 78,86%, protein 23,20%, lemak 1,65% mineral 0,98% dan kalori 114 kkal (Rosyidi, 2009). Kandungan gizi pada 100 gram daging ayam adalah protein 22 g, lemak 60 g, kalsium 13 g, fosfor 190 mg, Vit A 243 mg, Vit B1 0,8 g, B16 0.16 g dan energi 404 kkal (Ditjen PKH, 2014).

Saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada daging ayam. Beberapa perusahaan berskala besar yang mengolah daging ayam telah mulai mengekspor ke pasar

Jepang dan Papua Nugini, namun belum dilakukan secara reguler. Untuk itu, faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing daging ayam perlu diidentifikasi. Perdagangan daging ayam global didominasi oleh daging ayam beku, sebagian besar dijual di pasar-pasar modern berfasilitas pendingin. Sementara itu, penjualan karkas ayam segar di Indonesia didominasi oleh pasar tradisional, warung-warung sayuran dan lapak-lapak yang menggunakan meja sederhana sehingga daya saing karkas ayam belum diperhatikan oleh produsen dan konsumen, serta belum diterapkannya standar mutu karkas ayam. Karkas ayam diklasifikasikan berdasarkan umur dan bobot karkas. Berdasarkan umur, ayam dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: (1) < 6 minggu atau ayam muda (fryer/broiler), (2) 6 minggu sampai dengan 12 minggu atau ayam dewasa (roaster), dan (3) > 12 minggu atau ayam tua (stew). Berdasarkan bobot karkas dibagi menjadi 3 (tiga) jenis ukuran yaitu 1) <1,0 kg atau ukuran kecil, 2) 1,0 kg sampai dengan 1,3 kg atau ukuran sedang, dan 3) >1,3 kg atau ukuran besar.

SNI 3924:2009 Mutu Karkas dan Daging Ayam merupakan SNI yang sudah berumur lama. Untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi, menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI, maka SNI 3924:2009 dikaji ulang, yaitu dicek kembali isi dan format SNI untuk direvisi atau ditetapkan kembali.

Pembahasan kaji ulang SNI 3924:2009 Mutu karkas dan daging ayam meliputi sejumlah aspek yang diharapkan setelah revisi dan ditetapkan menjadi SNI 3924:2023 akan lebih banyak *stakeholder* yang menerapkan. Aspek yang menjadi topik bahasan meliputi:

- kesesuaian judul SNI dengan isi substansi;
- kebutuhan terhadap SNI;
- topik/isi SNI relevan dengan perkembangan IPTEK terkini;
- kesesuaian SNI dengan ketentuan Pedoman Penulisan SNI dan Pedoman lain yang berlaku;
- acuan normatif/referensi masih berlaku;
- CATATAN Dalam hal SNI adopsi identik standar internasional namun ternyata standar acuan yang diadopsi telah diabolisi/withdrawn maka, SNI tersebut harus direvisi.

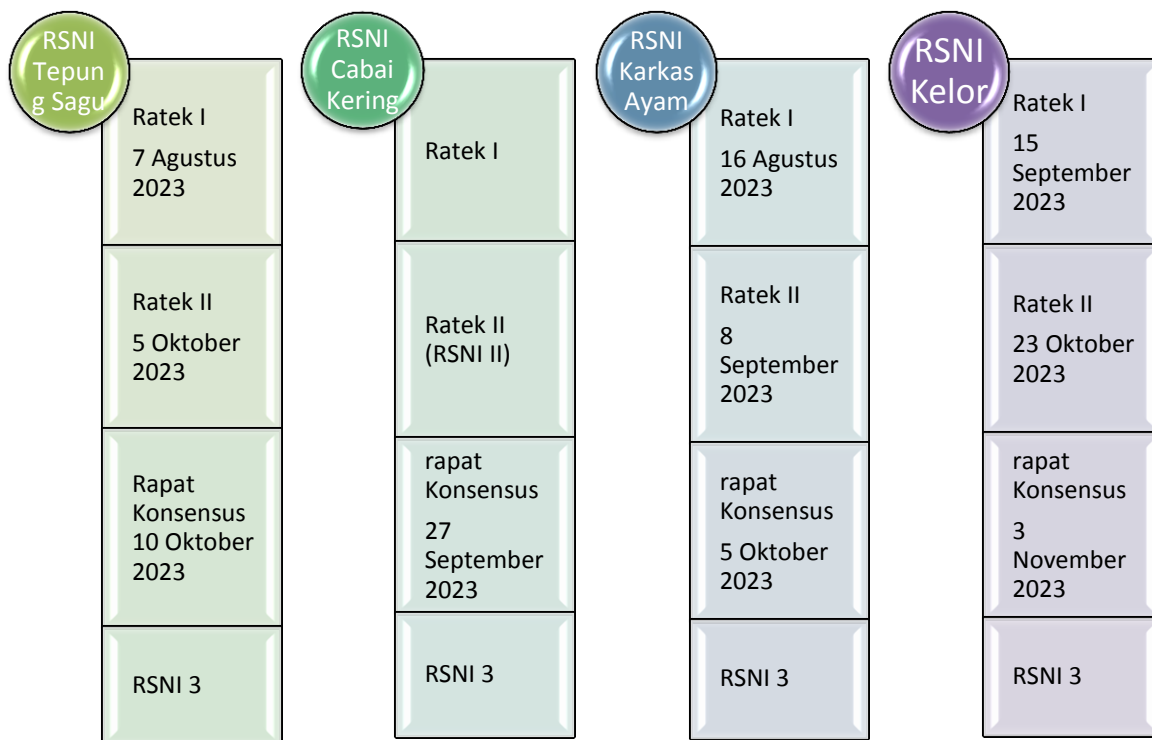
Pada SNI produk, minimal harus mencakup persyaratan mutu dan metode uji, serta pengambilan contoh yang dapat dilakukan pada seluruh badan SNI, pada sejumlah poin-poin utama, ataupun pada pasal-pasal nya.

Kegiatan rancangan standar nasional Indonesia (RSNI) dilakukan melalui: (a) koordinasi, survey, dan (b) pertemuan (rapat) pembahasan RSNI 3924:2009 Mutu Karkas dan Daging Ayam. Rapat atau pertemuan pembahasan RSNI yang terdiri atas rapat tim konseptor (menyusun konsep/draft), tim komite teknis, rapat konsensus dan jajak pendapat

untuk menghasilkan SNI yang ditetapkan oleh BSN. Pada kegiatan koordinasi dan survey, dilakukan sekaligus kegiatan pengambilan sampel karkas ayam di RPHU (PT Ciomas Adisatwa/JAPFA, PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Kartika Eka Dharma, pasar modern maupun tradisional) sebagai kegiatan lapang dan selanjutnya dilakukan uji parameter fisik (ada tidaknya memar, dan organoleptik) dan mutu mikrobiologi (total plate count, E.coli, koliform, Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Campylobacter sp). Pengujian mutu di laboratorium untuk memperoleh data dukung dalam pembahasan RSNI. RSNI karkas dan daging ayam ras sudah ditetapkan menjadi SNI 3924:2023 melalui SK Kepala BSN no 567/KEP/BSN/12/2023.

Tabel 8. Ruang lingkup RSNI Karkas dan daging ayam ras

Judul SNI	Karkas dan daging ayam ras
Alasan diperlukan SNI	untuk memberi jaminan terhadap keamanan dan mutu karkas dan daging ayam ras dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi
Ruang Lingkup	istilah dan definisi, klasifikasi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, metode uji, cara pelabelan, serta cara pengemasan karkas dan daging ayam ras. Catatan: Standar ini tidak berlaku untuk karkas dan daging ayam ras segar hangat.



Gambar 3. Alur Penyusunan RSNi

Tabel 9. Pembahasan Draft RSNi

RSNI/ Pembahasan	RSNI Tepung Sagu	RSNI Cabai kering	RSNI Karkas dan daging ayam ras	RSNI Daun Kelor
Ratek I	➤ Prakata ➤ Istilah dan definisi ➤ Komposisi ➤ Syarat Mutu	✚ Ruang lingkup ✚ Pengkelasan ✚ Rekomendasi ✚ Syarat mutu	✚ Perubahan Judul ✚ Istilah dan definisi ✚ Kriteria perubahan warna ✚ Kriteria untuk pengemasan penggunaan styrofoam dihilangkan	➤ Judul ➤ Persyaratan Mutu ➤ Acuan Normatif
Ratek II	➤ Prakata ➤ Ruang	✚ Perbaikan Syarat mutu	✚ Kriteria fisik pada	➤ Warna dengan

RSNI/ Pembahasan	RSNI Tepung Sagu	RSNI Cabai kering	RSNI Karkas dan daging ayam ras	RSNI Daun Kelor
Rapat Konsensus	Lingkup ➤ Acuan Normatif ➤ Istilah dan definisi ➤ Syarat Mutu	✚ Perbaikan istilah dan definisi ✚ Kelas mutu terdiri dari buah utuh, kontaminasi fisik dan keseragaman warna ✚ Penandaan dan pelabelan	karkas ayam ✚ Kriteria memar pada karkas ✚ Kriteria kebersihan karkas	beberapa kelas mutu ➤ Parameter aroma dan rasa khas ➤ Cemaran mikroba dan cemaran logam ➤ Syarat mutu
	RSNI ini sudah disepakati secara consensus untuk menjadi RSNI 3 dan masuk ke tahap jajak pendapat	Dalam rapat konsensus telah disepakati bahwa RSNI cabai kering sudah pada tahap RSNI3	Hasil Rakon berupa konsep RSNI-3 selanjutnya diajukan ke BSN untuk proses Jajak Pendapat	Hasil rapat konsensus yang sudah disepakati kemudian menjadi RSNI3 yang akan diproses oleh BSN dan dilakukan Jajak Pendapat.

LS PRO dan LPH Pascapanen

Sertifikasi produk merupakan suatu langkah konkrit dalam upaya peningkatan mutu/kualitas suatu produk serta berdaya saing. Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/2011, tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/PP.140/11/2016. Berdasarkan hal tersebut, maka LSPro terkait Pascapanen pertanian diperlukan untuk menjamin mutu dan kualitas produk pascapanen pertanian. Saat ini diperkirakan jumlah UMKM sekitar 69,2 juta dengan 8% fokus pada sektor makanan (6 juta unit). Di sisi

lain, populasi muslim di Indonesia dan kondisi demografi Indonesia sebagai negara kepulauan, menjadi dasar pertimbangan perlunya peningkatan jumlah dan kapasitas LPH di seluruh Indonesia.

LPH merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan Produk termasuk penugasan terhadap auditor halal. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian mempunyai fasilitas laboratorium yang terakreditasi ISO/EIC 17025:2017, ISO 17043:2010 dan ISO 9001:2015; SDM yang kompeten dengan sarana prasarana yang memadai, sehingga menjadi modal yang cukup untuk terbentuknya LPH. Dengan demikian BBPSI Pascapanen Pertanian mempunyai daya saing yang kompetitif, mudah dan terjangkau bagi UKM dan industri pangan lainnya. Alur Proses Kegiatan Persiapan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah sebagai berikut



Gambar 4. Alur Proses Kegiatan Persiapan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

BSIP Pascapanen Pertanian melaksanakan pelatihan auditor untuk Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (LSPro)

BSIP Pascapanen Pertanian melaksanakan pelatihan auditor untuk Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (LSPro) selama empat hari dari tanggal 24 dan 27 — 29

November 2023. Pelatihan ini dilaksanakan di dua tempat yaitu BSIP Pascapanen Bogor dan BSIP Padi di Subang. Pelatihan ini merupakan serangkaian pelatihan yang telah dilakukan pada tahun 2023 ini. Jenis pelatihan yang sudah dilakukan untuk persiapan pendirian LSPro antara lain Pelatihan pemahaman ISO/IEC 17065:2012 dan ISO/IEC 17067:2013; Pelatihan penyusunan dokumen ISO/IEC 17065; Pelatihan auditor halal; Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC); Pelatihan kalibrasi internal; Pelatihan Pemahaman ISO 22000:2018 (Sistem Manajemen Keamanan Pangan-Persyaratan untuk Organisasi Dalam Rantai Pangan); Pelatihan estimasi ketidakpastian (EKP); dan Pelatihan Auditor untuk Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (LSPro) Lingkup Pertanian.



Gambar 5. Pelatihan Auditor untuk Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (LSPro)

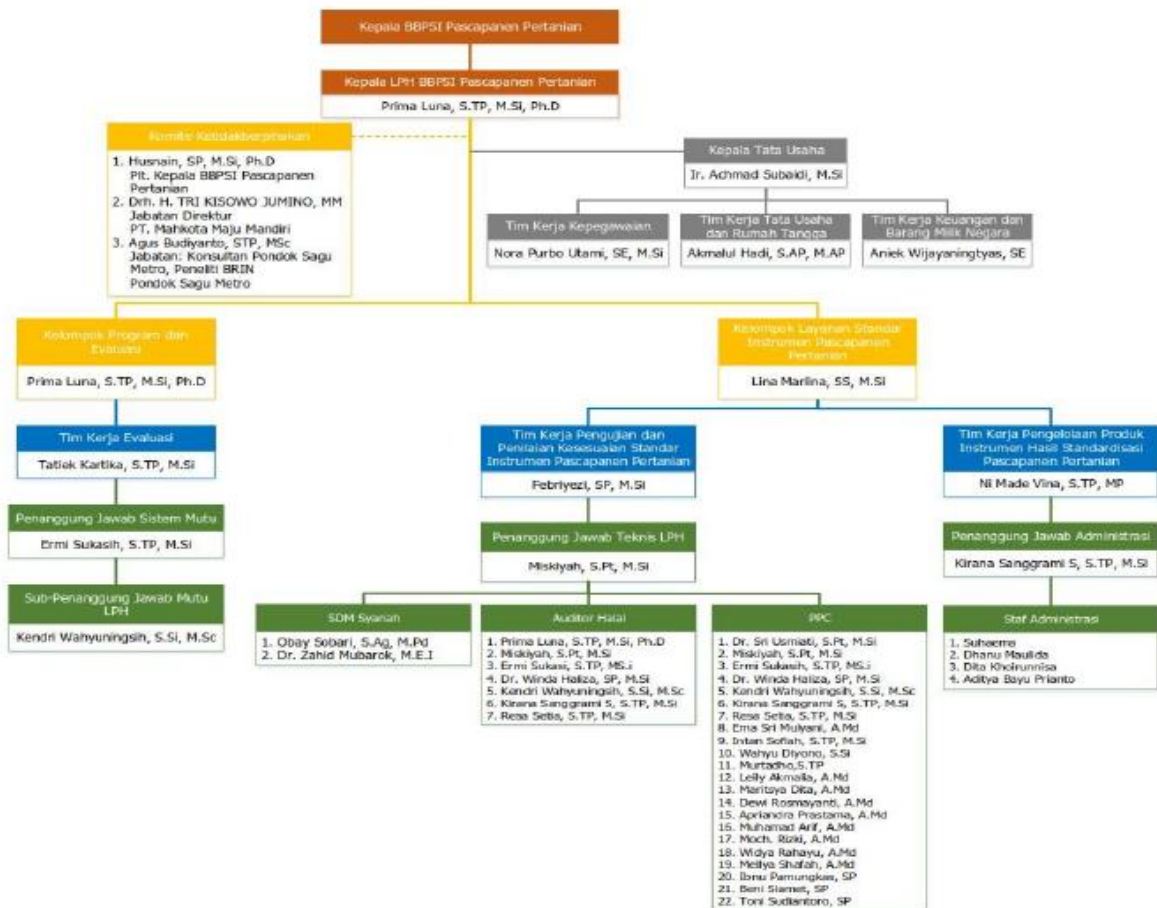
Pelaksanaan Review Dokumen LPH BBPSI Pascapanen

BSIP Pascapanen Pertanian telah membentuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi BBPSI Pascapanen yaitu melakukan penilaian kesesuaian. Dalam rangka menunjang terwujudnya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang baik, BSIP Pascapanen melaksanakan kegiatan Pendampingan Review Dokumen Lembaga Pemeriksa Halal pada tanggal 7 November 2023 di BSIP Pascapanen, Bogor. Kegiatan review dokumen ini bertujuan untuk melengkapi dan menelaah dokumen

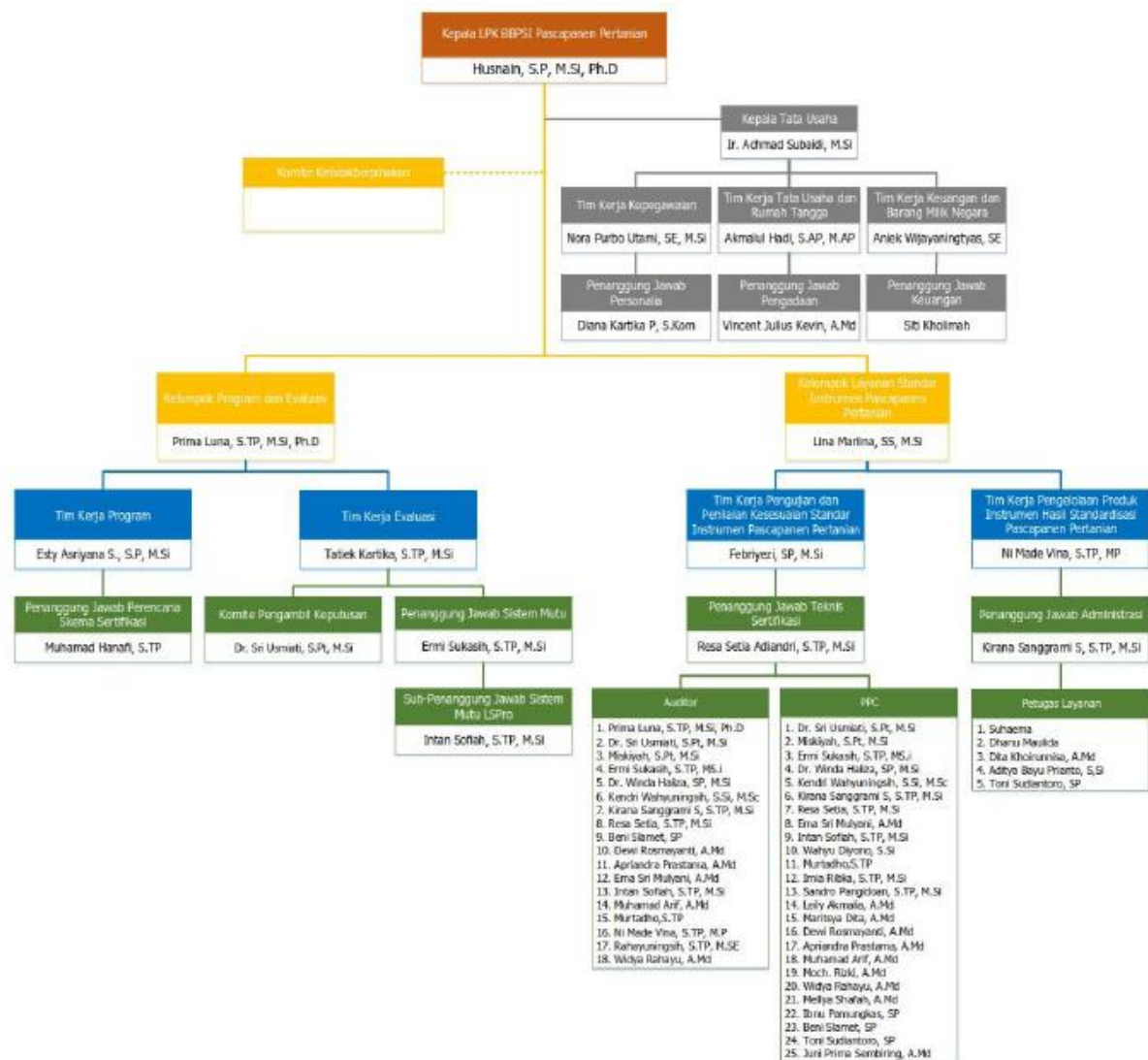
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSIP Pascapanen yang telah disusun oleh tim dokumen integrasi. Dokumen integrasi ini merupakan gabungan dari dokumen sistem mutu yang telah diselaraskan berdasarkan sistem mutu yang saat ini ada di BSIP Pascapanen, yaitu ISO/IEC 17025:2017; ISO/IEC 17043:2023; ISO/IEC 17065 untuk LSPro dan LPH.



Gambar 6. Review Dokumen LPH



Gambar 7.Struktur LPH BBPSI Pascapanen



Gambar 8.Struktur LSPro BBPSI Pascapanen

Pelaksanaan Pelatihan Auditor Halal

Dalam mendukung pendirian LPH BBPSI Pascapanen melaksanakan pelatihan auditor halaltanggal 12 sd 15 Juni secara offline (in house), bertempat di kantor IHATEC Bogor. Pelatihan auditor halal diikuti oleh 7 peserta calon auditor LPH BBPSI Pascapanen Pertanian. Trainer pelatihan merupakan auditor halal LPOM MUI dan assessor halal yang berpengalaman terkait dengan kehalalalan produk.

Kegiatan pelatihan berupa pemberian materi, diskusi interaktif, exercise, pre test dan post test. Pada akhir kegiatan peserta diminta untuk melakukan praktek lapang audit halal ke UKM atau pelaku usaha, sebelum dinyatakan untuk lulus dalam pelatihan auditor halal. Tahap selanjutnya adalah peserta harus mengikuti uji kompetensi sebagai auditor halal sebelum dinyatakan sebagai auditor halal yang kompeten. Adapun materi yang dipelajari dalam pelatihan auditor halal tersebut meliputi pre test, Pengantar auditor halal, Regulasi

LPH dan auditor halal, Penerapan kriteria SJPH, Titik Kritis Bahan dan Persyaratan Dokumen, Praktek dan Pembahasan Lembar Kerja (LK) 1, Proses Persiapan Pemeriksaan Bahan & PPH, Praktek dan Pembahasan Lembar Kerja 2, Proses Pra Pemeriksaan Bahan & PPH, Praktek Lembar Kerja (LK 3), Pembahasan Lembar Kerja (LK) 3 tentang proses pra pemeriksaan bahan & PPH, Proses Pemeriksaan & Pelaporan Bahan & PPH, Proses tindak lanjut pemeriksaan bahan & PPH, Penjelasan Role Play Audit Halal, Praktek Lembar Kerja (LK) 4 dan Lembar Kerja (LK) 5, Presentasi dan Pembahasan Role Play Audit Halal (LK 4 dan LK 5), Persiapan Uji Kompetensi Auditor Halal, Penjelasan Tugas Praktek Lapang, Post Test.

Rekomendasi Kebijakan

Balai Besar Pengujian Standardisasi Instrumen Pascapanen Pertanian pada tahun 2023 menghasilkan output rekomendasi kebijakan terkait standar instrumen pascapanen pertanian. Studi ini mengevaluasi kebijakan standar instrumen pascapanen pertanian dan sejauh mana evaluasi penerapan standar terkait pascapanen dan kebijakan pemerintah, kemudian dirumuskan suatu rekomendasi kebijakan standar pascapanen untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing. Standardisasi instrumen pertanian merupakan rangkaian proses yang komprehensif untuk menyediakan standar untuk instrumen pertanian yang kemudian diatur dengan kewenangan BSN (Badan Standardisasi Nasional) menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Proses ini bertujuan untuk memberikan dukungan peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel sektor pertanian. Pada akhirnya, penerapan standar instrumen pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Beberapa pangan lokal strategis Indonesia seperti jagung, sorgum, kedelai, ubi kayu, dan porang telah dikembangkan sejak lama dan semakin massif beberapa tahun belakang ini termasuk melalui program Badan Litbang Pertanian yaitu kegiatan Riset Pengembangan Inovatif Kolaboratif (RPIK) pada Tahun 2021. Program RPIK tersebut merupakan pioneer kegiatan pertanian terintegrasi hulu ke hilir yang sangat potensial keberlanjutannya, sehingga perlu dipantau dan dievaluasi dampak programnya. Hal ini yang menjadi dasar pemilihan lokasi RPIK pangan lokal sorgum dan tanaman hias oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen) untuk melaksanakan kegiatan analisis standar guna mengevaluasi kebijakan secara mendalam pada kondisi eksisting komoditas strategis dan komoditas ekspor, serta mengevaluasi dampak dan efektifitas implementasi instrument pascapanen di lokasi Kawasan program ex-RPIK dan

merekomendasikan suatu kebijakan sebagai rumusan dan dilaporkan pada pimpinan serta ditindaklanjuti dalam suatu aksi di lapang.

Kajian ini akan diitikberatkan pada dampak dan efektifitas instrumen dan prosedur pascapanen pertanian yang diintroduksi di lokasi program RPIK, antara lain kawasan sorgum di Flores Timur, NTT, di Kawasan program dengan komoditas ekspor yaitu krisan di Tomohon, Sulawesi Utara, serta dilaksanakan kajian risiko untuk menyusun kebijakan/regulasi/ SOP/ juknis terkait isu keamanan pangan.

Rekomendasi Kebijakan Pangan Strategis Sorgum di Kawasan Ex-RPIK

Upaya mendukung pengembangan sorgum di NTT yaitu melalui pendekatan yang diawali dari pasar dan konsumen, kemudian produksi pangan olahannya, kemudian dilanjutkan kearah produksi bahan bakunya. Fokus utamanya ada pada pengembangan kelembagaan pasar dan konsumsi, serta dilihat dari preferensi konsumen.

Diskusi tindak lanjut terkait sorgum pada peningkatan kepedulian terhadap usaha tani sorgum, meningkatkan mutu dan promosi konsumsi sorgum yang harus menjadi program dinas, interaksi antara wilayah produsen dan wilayah konsumen sorgum, bantuan terhadap produsen sorgum agar terus memproduksi sorgum, kontrak pengadaan sorgum harus dilanjutkan, konsumen sorgum perlu dijaga kebutuhan beras sorgumnya, mendorong pengembangan usaha pangan berbasis sorgum (tepung sorgum), membuat *link* antarpasar (internal NTT dan lintas pulau) yang sudah mmendapat dukungan penuh dari Presiden RI Joko Widodo.

Perumusan kebijakan menggunakan data primer dengan jenis data kualitatif. Data diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung dan FGD dengan pihak yang terkait atau berkepentingan dalam pengembangan agribisnis sorgum. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan metode analisis SWOT. Pada analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats), data dikelompokkan ke dalam data internal dan data eksternal, kemudian dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternalnya.

RUMUSAN REKOMENDASI STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DIRUMUSKAN BERDASARKAN MATRIKS SWOT



Kebijakan Penanganan Pascapanen di Kawasan Ex-RPIK Krisan Potong

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), volume produksi sekitar 323 juta tangkai pada Tahun 2022. Jumlah tersebut turun 5,94% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 344,03 juta tangkai. Bunga krisan biasanya digunakan untuk dekorasi, acara suka cita, maupun duka cita, namun sejak pandemik covid, ekspor sudah berkurang karena pemanfaatan bunga krisan untuk acara seperti pernikahan dan upacara lainnya sudah tidak dilaksanakan, sehingga sudah tidak lagi membutuhkan bunga krisan. Dukungan untuk krisan sudah sejak tahun 2019, pendampingan yang sudah dilakukan dimulai dari budidaya hingga ekspor. Dalam upaya peningkatan budidaya dan produksi, petani sudah diberikan bantuan teknologi-teknologi dari Balitbangtan. Karena dukungan sudah diberikan sejak tahun 2019, maka tujuan RPIK 2021 adalah berfokus pada ekspor. Volume ekspor bunga

krisan pada 2020 kurang lebih 43.500 kilogram dengan nilai 732.734 USD, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 131.500 kilogram dengan 903.929 USD.

Peningkatan permintaan menunjukkan bahwa krisan sangat berpotensi untuk dikembangkan dan didorong percepatan ekspor dengan sentuhan teknologi dan penerapan standar penanganan pascapanen terutama pengemasan untuk transportasi antarpulau atau antarnegara yang dapat membantu menjaga kesegaran bunga potong krisan potong. Penanganan pascapanen bunga krisan potong masih beragam di tingkat pelaku usaha. Walaupun beberapa petani dan pengumpul sudah melakukan prosedur penanganan pascapanen dengan baik. Sedangkan, aspek budidaya yang baik telah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petani.

Rumusan Rekomendasi Kebijakan Penanganan Pascapanen Krisan Potong

Berdasarkan hasil FGD dan beberapa kunjungan ke lokasi produsen maupun distributor untuk melihat praktik penanganan pascapanen krisan potong, maka disusunlah beberapa rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan telah kepada Kepala Balai Besar Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian serta Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian. Poin poin rekomendasi yang disampaikan diantaranya adalah :

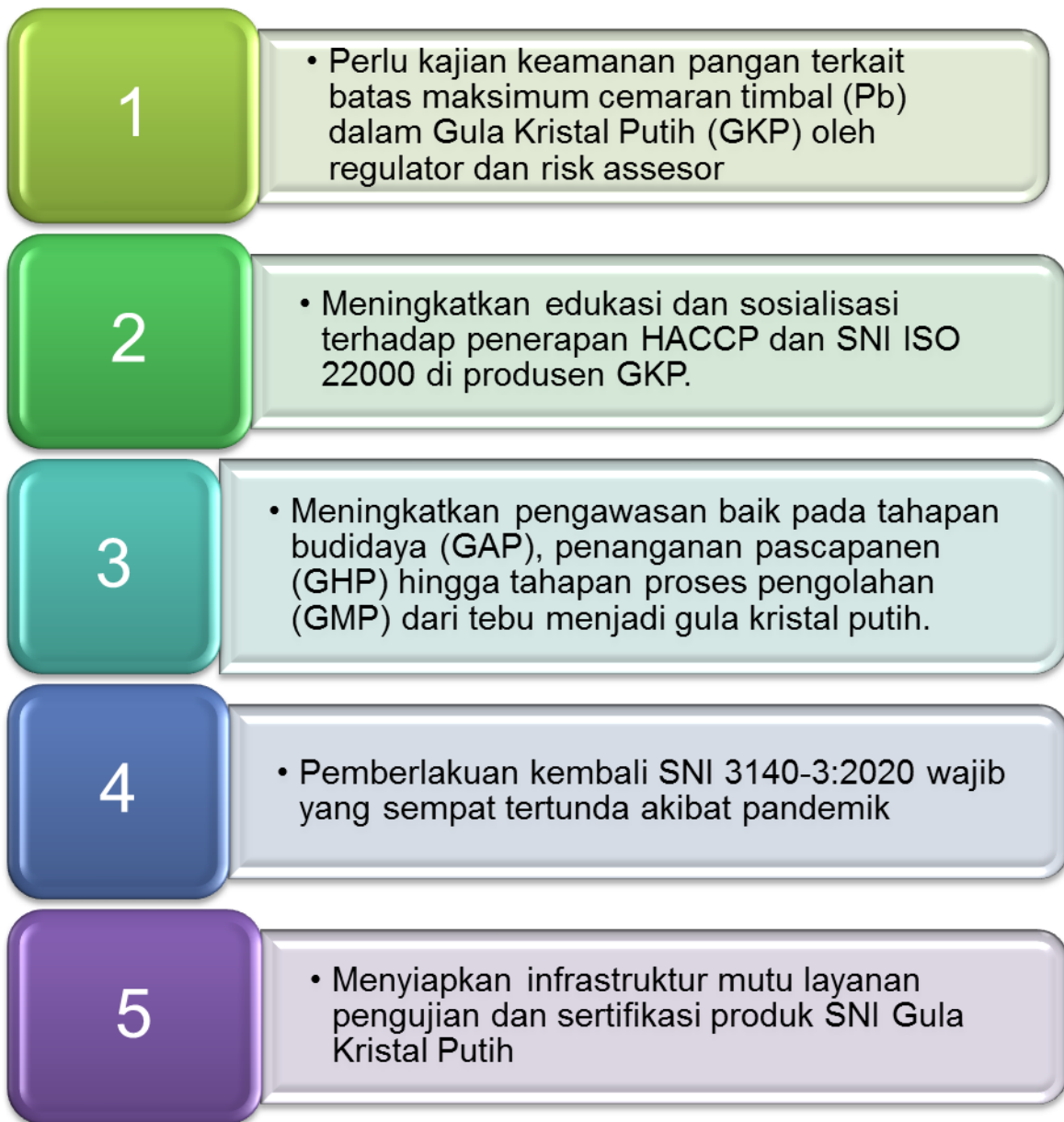
- 1
 - Melarang praktik pembeli/*florist* yang memanen bunga sendiri di dalam *greenhouse*, karena dikhawatirkan membawa penyakit (*biosecurity*)
- 2
 - Tetapkan harga yang berbeda untuk kualitas yang berbeda sesuai dengan gradenya, agar petani dapat menerapkan grading
- 3
 - perlu adanya skema rantai pasok serta adanya kelompok/lembaga tertentu yang dapat menjadi pengumpul serta mengurus proses untuk ekspor, sehingga petani dapat fokus di budidaya dan panen
- 4
 - Perlu adanya pelatihan untuk petani dan kelompok tani untuk melakukan penanganan sesuai standar mulai dari budidaya hingga pascapanen
- 5
 - Harus adanya insentif dan benefit untuk petani yang berkomitmen untuk menerapkan standar penanganan untuk ekspor
- 6
 - Perlu adanya SNI untuk SOP penanganan pascapanen mulai dari pemanenan hingga pengemasan dan transportasinya sehingga bunga krisan potong dapat bersaing dengan bunga potong lainnya
- 7
 - Perlu adanya dukungan kebijakan Pemda setempat sentra produksi bunga krisan untuk pemanfaatan bunga segar dan promosi bunga segar potong untuk ekspor
- 8
 - Perlu kajian lebih lanjut untuk prosedur pengemasan dan transportasi bunga krisan potong untuk distribusi jarak jauh

Rekomendasi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagai tindak lanjut UU Pangan membagi kewenangan penyelenggaraan keamanan pangan dan Kementerian Sekretariat Negara telah menerima usulan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Berdasarkan surat perihal Batas Maksimal Cemaran Timbal (Pb) pada Gula Kristal Putih dari Direktorat Jendral Perkebunan mengenai permintaan identifikasi kontaminasi cemaran timbal pada tahap pascapanen dan pengolahan tebu. tim dimohon untuk melakukan pengujian cemaran timbal untuk mengetahui kontaminasi timbal pada tahap pascapanen dan pengolahan tebu.

Tim Analis Kebijakan BBPSI Pascapanen melakukan sampling produk GKP dari sedikitnya 9 perusahaan yang berbeda, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ditemukannya cemaran timbal pada produk GKP tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses budidaya dan hingga proses pengolahan dan teknologi yang diterapkan dalam memproduksi GKP dari perusahaan-perusahaan tersebut sudah dilakukan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut disusunlah beberapa rekomendasi kebijakan diantaranya adalah:



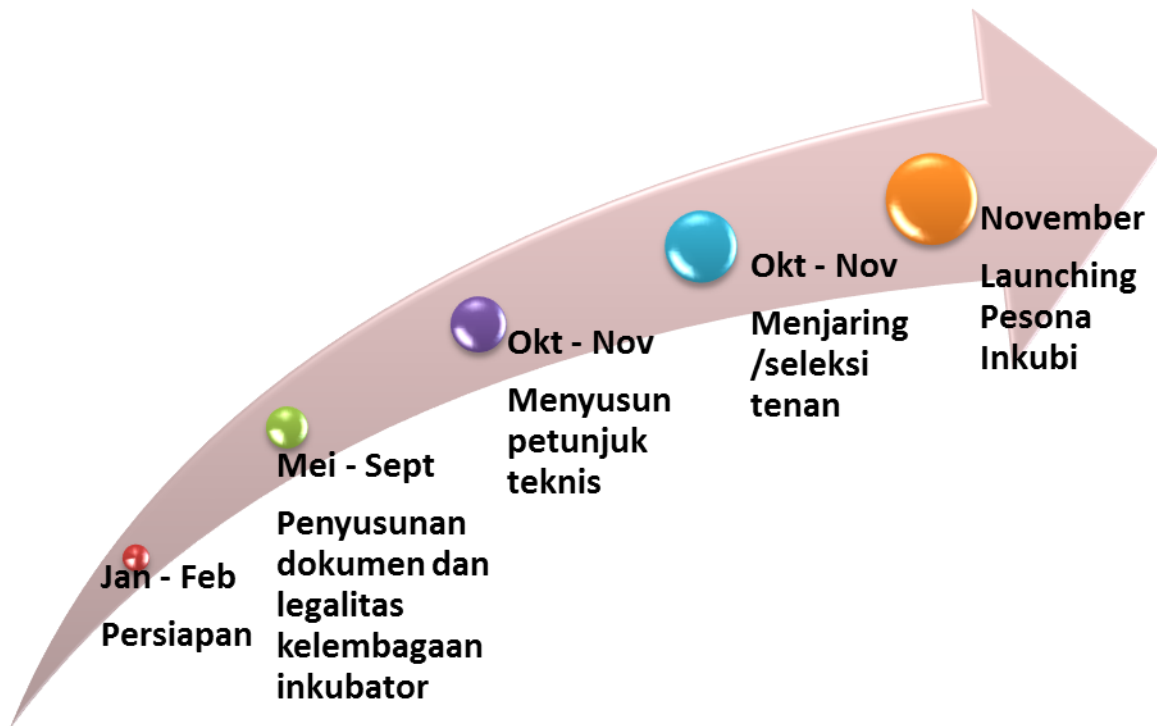
INKUBATOR BISNIS

Penyebarluasan hasil standardisasi instrument pascapanen salah satunya dapat dilakukan melalui percontohan dengan menerapkan standar kepada kelompok tani/UMKM. Penerapan ini dilakukan melalui proses pendampingan kepada kelompok tani/UMKM yang melakukan penanganan dan pengolahan pascapanen pertanian. Proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru merupakan proses inkubi yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis seperti dalam penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. Kegiatan Inkubasi Bisnis sangat penting karena mengembangkan UMKM, korporasi/kelembagaan petani, dan *stakeholders* lainnya menuju pertanian maju, mandiri dan modern. Sebanyak 25 Juta UMKM

di bidang pertanian dan pangan yang memerlukan pendampingan dan pengawalan, sehingga inkubasi bisnis pascapanen pertanian menjadi titik ungu dalam pengembangan usaha UMKM.

Tugas BBPSI Pascapanen sebagai lembaga inkubator adalah menyediakan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu. Beberapa tahun terakhir, BBPSI Pascapanen telah memiliki kegiatan inkubator, namun kegiatan tersebut belum optimal dilakukan dimana pendampingan yang dilakukan baru terbatas pada teknologi dan desain kemasan, sedangkan untuk ilmu manajemen bisnis dan pemasaran belum disentuh. Disamping itu incubator yang dimiliki belum bersifat resmi/belum terdaftar di asosiasi incubator bisnis (AKUBI).

Pelaksanaan inkubator bisnis dengan menerapkan standar pascapanen yang baik dapat menumbuhkan pelaku usaha pertanian baru, dan menguatkan mitra pelaku usaha yang telah dibina. Sehingga bisa meningkatkan nilai tambah bagi pengguna dan meningkatkan daya saing hasil pertanian Indonesia di pasar internasional.



Alur Kegiatan Pengembangan Inkubator Bisnis BBPSI Pascapanen

Inkubator bisnis dimaksudkan untuk menumbuhkan wirausaha/UMKM pertanian, memberikan pendampingan inkubasi bisnis pascapanen kepada *tenant* dan kebijakan pascapanen pertanian yang akan dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu produk pertanian Indonesia. Dalam rangka mencapai sasaran, inkubator bisnis memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan dokumen kelembagaan (BMC, *Action Plan*, bisnis plan, SOP, dan Juknis) dan legalitas pendirian dan manajemen Inkubator Bisnis Pascapanen
 Pada tanggal 23 Mei 2023 dilaksanakan pelatihan “Penyusunan BMC dan Action Plan Inkubator” dengan Narasumber Deva Primadia Almada MSi dari Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia untuk menyusun dokumen kelembagaan inkubator bisnis BBPSIPP berupa Business Model Canvas (BMC) dan Action Plan (AP)
- b. Penyusunan Petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pesona Inkubi
 Petunjuk teknis Pesona Inkubi BSIP Pascapanen Tahun 2023 merupakan acuan dan informasi bagi semua pihak untuk pelaksanaan kegiatan Pesona Inkubi BBPSI Pascapanen Tahun 2023 Penyusunan petunjuk teknis inkubator bisnis BSIP Pascapanen

telah dilaksanakan pada bulan September 2023, dan review Juknis pada tanggal 29 September 2023. *Coaching* Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inkubator Bisnis Pascapanen pada tanggal 9 Agustus 2023

c. Menjaring/Seleksi Tenan

Penerimaan calon tenant tahun 2023 telah dibuka tanggal 13 – 22 Oktober 2023 dan sudah mendaftar 5 calon tenant

Tabel 10. calon tenant Inkubator Bisnis

No	Nama Perusahaan	Jenis Produk	Kebutuhan Pendampingan
1	Hudaya Berkah Farm (UKM)	Keripik singkong	Mesin dan peralatan Produksi, Pembukuan Keuangan sederhana, Penyusunan Business plan, Website untuk pemasaran online, Akses Perbankan/sumber Pemodalan, Akses Kerjasama Pemasaran, Gelar produk dan Pameran
2	Dawa (UKM)	Olahan Sambel	Ruang usaha, Mesin dan peralatan Produksi, Perbaikan Teknis Produksi, Pembukuan Keuangan sederhana, Akses Kerjasama Pemasaran, Gelar produk dan Pameran
3	PT. Kompetensi Inti Utama	Pangan segar	Ruang usaha, Perijinan Usaha, Sertifikasi Produk, Mesin dan peralatan Produksi, Perbaikan Teknis Produksi, Perbaikan Kemasan produk, Pembukuan Keuangan sederhana, Penyusunan Business plan, Website untuk pemasaran online, Akses Perbankan/sumber Pemodalan, Akses Kerjasama Pemasaran, Gelar produk dan Pameran
4	PT. Solutech Multi Sentosa	Nasi instan, Kacang hijau instan, sop instan	Ruang usaha, Perijinan Usaha, Sertifikasi Produk, Mesin dan peralatan Produksi, Penyusunan POB/SOP Produksi
5	Subali Yoghurt And Milk (UKM)	Olahan minuman	Perbaikan Teknis Produksi agar produk homogen dan tahan lama, Perbaikan Kemasan produk, Penyusunan POB/SOP Produksi, Pembukuan Keuangan sederhana, Penyusunan Business plan, Website untuk pemasaran online, Akses Kerjasama Pemasaran, Gelar produk dan Pameran

Dari hasil seleksi, tim seleksi memutuskan UKM Subali Yoghurt and Milk dan PT. Solutech Multi Sentosa lolos untuk menjadi tenant Pesona Inkubi. Pelaksanaan pendampingan kedua tenant diatas akan dilakukan pada tahun 2024 sesuai dengan dana yang tersedia.

d. Launching Pesona Inkubi

Launching Inkubator Bisnis PESONA INKUBI di lakukan bersamaan dengan launching LsPro dan Rapat Konsolidasi BBPSI Pascapanen Pertanian pada tanggal 14 November 2023 di Auditorium Sadikin Sumintawikarta, Kota Bogor. Launching dan Konsolidasi Layanan Standar Pascapanen Pertanian memiliki tema “Mewujudkan Layanan Prima Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pascapanen Pertanian”. Pesona Inkubi secara struktur organisasi berada di bawah Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Balai Besar Nomor 131/Kpts/HM.130/H.10/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023, sehingga status PESONA INKUBI adalah milik Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian.



Gambar 9. Launching Inkubi BBPSI Pascapanen

MANAJEMEN BBPSI PASCAPANEN PERTANIAN PENERAPAN DAN PENYEBARLUASAN STANDAR

KERJA SAMA

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

a. Perjanjian Kerja Sama BBPSI Pascapanen dengan KPRI Pascapanen

Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian Kerjasama antara BB Pascapanen dengan KPRI Pascapanen Nomor B-2785.1/HK230/H10/09/2021 maka KPRI Pascapanen melaksanakan kerjasama yang baru dengan BSIP Pascapanen dengan nomor perjanjian kerja sama B-997.1/HK.230/H.10/07/2023, 138/Sk/KPRI-PASC/XII/23 yang ditandatangani tanggal 10 Juli 2023 tentang Pemanfaatan Teknologi Pascapanen Terstandar. Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Pemanfaatan teknologi pascapanen dan pengolahan hasil pertanian terstandar;
- ii. *Coaching* teknologi pascapanen dan pengolahan hasil pertanian terstandar;
- iii. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
- iv. Pemanfaatan ruang terbuka dan ruang rapat untuk mendukung aktifitas bersama.

b. Penandatanganan Kerja Sama BBPSI Pascapanen dengan LPPOM MUI

Untuk mendukung pembentukan Lembaga Sertifikasi Halal BSIP Pascapanen, BSIP Pascapanen melaksanakan kerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis ulama indonesia (LPPOM MUI) tentang pengujian dengan nomor: PKS04/Dir/LPPOM MUI - BSIP/XI/202327, B-2017/HK.230/H.10/11/2023 tanggal 27 November 2023.. Ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian ini terbatas pada Pengujian Laboratorium yang dilakukan di lokasi Pihak Pertama, yaitu Laboratorium LPPOM MUI yang beralamat di Gedung Global Halal Centre, Tanah Sereal, Jl. Pemuda No.5, Sempur, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16161.
- ii. Lingkup sampel pada Perjanjian ini adalah sampel yang berasal dari BSIP Pascapanen.
- iii. Lingkup Pengujian Laboratorium pada Perjanjian ini mengacu pada lingkup Pengujian Laboratorium LPPOM MUI sesuai dengan sertifikat Akreditasi Laboratorium No. LP-1040-IDN – SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025/2017), yang diterbitkan pada 5 November 2020 dan berlaku s/d/ 20 September 2025 (Lampiran 1); namun tidak terbatas pada parameter lingkup pengujian.

c. Penandatanganan Kerja Sama BSIP Pascapanen dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ibnu Khaldun

Dalam mendukung program pemerintah untuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, BSIP Pascapanen melaksanakan kerja sama dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun tentang Pendidikan Program Penelitian dan Magang Dalam Kegiatan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan nomor perjanjian kerja sama 08/K.9/Fikes/UIKA/2023 tanggal 21 September 2023. Penyelenggaraan program meliputi kesepakatan di bidang:

- i. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa magang/praktik kerja, Kegiatan kewirausahaan dan Pengabdian kepada masyarakat;
- ii. Pelaksanaan program standarisasi di bidang pangan dan gizi;
- iii. Penyelenggaraan forum ilmiah (temu ilmiah, focus group discussion, lokakarya, seminar, symposium, talkshow, atau bentuk-bentuk forum ilmiah lainnya) mengenai ilmu pengetahuan dan standarisasi pada bidang pangan dan gizi;
- iv. Pengembangan ilmu pengetahuan dan standarisasi bidang pangan dan gizi.
- v. Pengabdian masyarakat melalui penyebaran ilmu pengetahuan dan standarisasi pangan dan gizi
- vi. Kegiatan lain yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan akan dibicarakan lebih lanjut Serta pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian masyarakat.

d. Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Standardisasi Nasional

Dalam rangka melaksanakan kerja sama fasilitasi bimbingan teknis lembaga sertifikasi produk dan review dokumentasi mutu BBPSI Pascapanen melaksanakan kerja sama dengan BSN tentang fasilitasi bimbingan teknis Lembaga sertifikasi produk-review dokumentasi mutu dalam penerapan SNI ISO/IEC 17065:2012 Nomor B-1491.1/HK.230/H.10/09/2023, 19B/BSN/PKS/IX/2023 yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2023. Perjanjian kerja sama ini memiliki ruang lingkup bimbingan teknis di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian – Review Dokumentasi Mutu pada calon Lembaga Sertifikasi Produk untuk sertifikasi produk Beras, Gula Kristal Mentah (GKM) dan Gula Kristal Putih (GKP).

e. Kegiatan Kerja Sama AFACI dan BSIP Pascapanen

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian mengadakan evaluasi Akhir Kegiatan Establishment Asian Food Composition Database (AFCD) yang dibiayai dari dana AFACI di tahun kedua pada tanggal 25 Juli 2023. Acara ini dibuka oleh Plt BB Pascapanen dengan evaluator Lina Marlina SS, MSi, Prima Luna, PhD, Sandro Pangidoan

STP, MSi dan project investigator Dr. Winda Haliza. Acara dihadiri oleh Tim AFCD AFACI, perwakilan tata usaha dan perwakilan Kerjasama BBPSIPP.

Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama dengan Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI), Rural Development Administration of South Korea. Tujuan kegiatan AFCD AFACI adalah membangun database komposisi gizi makanan. Output tahun ke-1 kegiatan adalah data dan informasi komposisi gizi 20 jenis bahan pertanian, output tahun 2 adalah data dan informasi komposisi gizi 50 bahan pertanian dan rencana output tahun 3 adalah data dan informasi komposisi gizi 30 bahan pertanian.

Pada tanggal 21-15 Agustus 2023 telah diadakan evaluasi *Workshop: Establishment of Asian Food Composition Database (AFCD)* di Kuta, Bali yang dibuka pada tanggal 22 Agustus 2023. Diawali pembukaan oleh Sekretaris BSIP mewakili Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Sambutan dari AFACI disampaikan oleh Dr. Dong Jin Yoon, *Chief officer, Department of Agro-Food Resources, Rural Development Administration (RDA). Research Development Agriculture Korea*, memprakarsai program *Asian Food Agriculture Colaboration Initiatif (AFACI)* pada tahun 2009. Salah satu kegiatan AFACI adalah *Establishment of Asian Food Composition Database (AFCD)*. Kegiatan AFCD diikuti oleh 14 Negara, Korea Selatan, Vietnam, Cambodia, Laos, Philpines, Indonesia, Mongolia, Kyrgyzstan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Langka dan Thailand.

Dalam kegiatan itu BBPSI Pascapanen menerima penghargaan sebagai *The Most Outstanding Project Investigator* tahun 2022 dari *Asia Food Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)*. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Winda Haliza selaku PI 2023-2024 yang diserahkan oleh Dr. Dongjin Yoon, Direktur Nasional *Institute of Agricultural Sciences, RDA*.





Gambar 10. kerjasama dengan Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)

BSIP Dukung "*Green Energy*" Bekerjasama dengan Green Building Perancis

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Pascapanen melaksanakan kerjasama pengembangan biopelet di Indonesia dengan Green Building Perancis sejak tahun 2020. Green Building Perancis telah menghibahkan 5 unit alat pembuat biopellet yang diserahkan terimakan kepada BSIP Pascapanen pada hari Jumat (11/8/23) di Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serelia Karawang yang disaksikan oleh Kepala BSIP dan jajarannya.

Sesuai amanat Permentan Nomor 13 Tahun 2023, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepala Pusat dan Kepala Balai Besar lingkup BSIP untuk membahas prospek pengembangan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealia di Karawang. Laboratorium tersebut dilengkapi dengan workshop untuk Rice Milling Unit (RMU) modern, pembuatan biosilika dan biopelet (biobriket) untuk mendukung pengujian standar dan penyelenggara uji profesiensi (PUP). Laboratorium Mutu Beras di Karawang ini diharapkan dapat menjadi salah satu laboratoium uji mutu beras pionir dan dapat direplikasi ditempat lain pada sentra produksi beras di tanah air.





Gambar 11. kerjasama pengembangan biopellet di Indonesia dengan Green Building

Paten

Pada tahun 2023, terdapat 6 judul paten usulan BBPSI Pascapanen yang sudah terbit sertifikatnya. Judul, nama inventor, nomor paten serta masa berlaku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. judul paten usulan BBPSI Pascapanen

No	Judul Paten	Nama Inventor	Nomor Paten	Masa Berlaku
1	Formula Nata De Whey dan Proses Pembuatannya (Lampiran 13)	Dr. Sri Usmiati, M.Si Agus Budiyanto, S.TP, M.Sc Juniawati, S.TP, M.Si Citra Haerani	IDP000089823	Berlaku sampai dengan 20 tahun (2040)
2	Komposisi dan Proses Pembuatan Bahan Pengkompatibel (Compatibilizer) Untuk Produksi Kompon Karet Yang Berpengisi (Filler) Nano – Biosilika dari Sekam Padi (Lampiran 14)	Dr. Ir. Sri Yuliani, MT David Chrisnaldi Setiawan Ilot, ST, MDS Hoerudin, Ph.D Ir. Tatang Hidayat, M.Si Kendri Wahyuningsih, S.Si, M.Sc Ema Sri Mulyani, A.Md	IDP000088519	Berlaku sampai dengan 20 tahun (2040)
3	Proses Ekstraksi Gelatin Ceker Ayam dengan Kombinasi NaOH dan Asam Asetat (Lampiran	Miskiyah, SPt, MP Juniawati, S.TP.,MSi Agus Budiyanto, S.TP., M.Si Elmi Kamsiati, STP., M.Si	IDP000089821	Berlaku sampai dengan 20 tahun (2040)

No	Judul Paten	Nama Inventor	Nomor Paten	Masa Berlaku
	15)	Kirana Sanggrami Sasmitaloka, STP., M.Si Marman Wahyudi, Amd Triyono, SSI Pia Lestiana, BSc Ayu Kusuma, SSI Citra Chaerani, SSI Dwi Agriana, Amd Ratna Amalia, Amd		
4	Proses Pematihan Masa Dormansi Benih Bawang Putih Menggunakan Metode Thermalshock Beserta Karakteristik Produknya (Lampiran 16)	Ir. Tatang Hidayat, M.Si Dr. Setyadjit, MAppSc Ir. Rudy Tjahjohutomo, MT Kirana Sanggrami Sasmitaloka, S.TP, M.Si Abdullah Bin Arif, S.TP, M.Si Irfan Badrul Jamal, S.TP Sandro Pangidoan, S.TP, M.Si Sari Intan Kailaku, S.TP, M.Si	IDP000089822	Berlaku sampai 20 tahun (2040)
5	Proses Pembuatan Tepung Pregelatinisasi Ubikayu Berbasis Sawut/Chip Kering dan Penggunaan Sebagai Ingradien Pangan (Lampiran 17)	Dr. Prayudi Syamsuri, SP, M.Si Dr. Ir. Endang Yuli Purwani, MSi Agus Budiyo, S.TP, M.Sc Wahyu Diyono, S.Si Eka Rahayu, S.TP, M.Si Dr. Edi Mulyono Ayu Kusuma, S.Si Prof. Djoko Said Damardjati Ir. Murman Budijanto, MT, MIDEc Dr. Nuning Argo Subekti, SP, M.Sc Ir. I Putu Wardana, M.Sc Rizky Prayogo Ramadhan, SE, M.Si Oky Dwi Purwanto, SP., M.Si	IDP000084586	Berlaku sampai dengan 20 tahun (2040)

No	Judul Paten	Nama Inventor	Nomor Paten	Masa Berlaku
		Marman Wahyudi, Amd Danuarsa, Amd		
6	Produk Nanoenkapsulat Antivirus Berbasis Eucalyptus (Lampiran 18)	Dr. Ir. Sri Yuliani, M.T Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si Dr. drh. NLP. Indi Dharmayanti, M.Si Dr. Ir. Prayudi Syamsuri, M.Si Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si Kendri Wahyuningsih, S.Si, M.Sc Risa Indriani, S.Si Ema Sri Mulyani, Amd R. Idris Suryadi	IDP000084597	Berlaku sampai dengan 20 tahun (2040)
7	Produk Kering Beku Pulp Durian dan Proses Pembuatannya (Lampiran 19)	Prof. Sr. Ir. Sri Widowati, MAppSc Sandi darniadi SP.MT. PhD Ir. Sunarmani, MS Ermi Sukasih, STP. MSi Kirana Sanggrami S, MSi	IDP000090579	Berlaku sampai dengan 20 tahun (2040)

Pekan Nasional (PENAS)

Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan Indonesia merupakan ajang berkumpul dan bersilaturahmi bagi para petani dan nelayan untuk saling berbagi pencapaiannya selaku pelaku utama dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Pada tahun ini, PENAS XVI diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 10 – 15 Juni 2023. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto membuka secara resmi Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan ke-XVI mewakili Presiden Jokowi secara virtual pada 10 Juni 2023. Acara yang digelar di Lanud Sutan Sjahrir, Padang ini dihadiri oleh 14 Gubernur, 300 Bupati/Walikota dan 28 ribu petani dan nelayan dari seluruh Indonesia.

Dalam perhelatan ini, Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian (BSIP) turut serta menampilkan Mini Pameran Gelar Percontohan Agribisnis di Saung Utama BSIP Kementan yang mempromosikan berbagai produk hasil pertanian seperti aneka produk olahan sorgum yaitu berasan, tepung, kecap, gula cair, *brown sugar* dan *white sugar*. Selain itu ditampilkan juga produk olahan dari jagung, pisang, ubi jalar, ubi kayu, talas, sagu, *Garcitea* yang terbuat dari campuran asam gelugur dan asam kandis, teh gambir, dan

olahan dari kakao serta produk *eucalyptus*. Produk2 pameran dilengkapi dengan aneka varietas beras seperti beras ciherang, tarabas, dll.

Aneka produk kopi didatangkan dari Aceh, Lampung dan Sulawesi, varietas ubi dari Sultra, gembili dari Papua, serta pepaya Medel dan Alpukat dari Kuansing Riau. Pengunjung Mini Pameran BSIP Kementan terlihat antusias dengan produk yang ditampilkan, karena selain melihat dan berkonsultasi mengenai produk, pengunjung juga dapat mencicipi produk-produk yang disediakan Panitia. Berbagai produk yang dapat dicicipi oleh para pengunjung meliputi nasi sorgum kebuli, eggroll sorgum, nasi goreng pisang, mi sagu spaghetti, keripik kabocha, edamame, telur ayam KUB, infuse water semangka, minuman coklat, pepaya medel dan kopi binturong yang produknya juga bisa dibeli di stan BSIP. Disamping itu, untuk menarik pengunjung pameran, panitia mengadakan *photo challenge* bagi pengunjung yang ingin mendapatkan souvenir cantik berupa topi, payung dan pulpen.



Gambar 12. Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan Indonesia

LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi publik

Webinar, kunjungan /konsultasi dan magang adalah media menginformasikan layanan melalui peragaan atau demonstrasi yang dilakukan mendukung kegiatan Kementerian Pertanian serta bersinergi dengan mitra. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di lapangan. Penyebarluasan melalui media cetak dilakukan melalui kerjasama dengan mass media cetak, elektronik dan mass media online nasional melalui penerbitan tulisan tentang layanan BBPSI Pascapanen

1. Melaksanakan Seminar Hybrid terkait standar

BSIP Pascapanen melaksanakan Seminar dengan tema “ Pentingnya Standar Mutu dan Keamanan Pangan untuk Produk Berdaya Saing” pada 27 Juni 2023 yang bertempat di Aula Lantai 2 BSIP Pascapanen. Pelaksanaan seminar bertujuan untuk : 1) memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang standar mutu dan keamanan produk; 2) Mensosialisasikan peraturan dan kebijakan terkait standar mutu di Indonesia; 3) Menjadi wadah komunikasi untuk pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing.



Gambar 13. Seminar Hybrid Terkait Standar Mutu dan Keamanan Pangan

2. Melaksanakan Seminar dengan tema “ Lesson Learned Badan Standardisasi Nasional dalam Menyebarkan Informasi Standar Nasional Indonesia ”

Pelaksanaan seminar bertujuan untuk : 1) meningkatkan kompetensi peserta dalam menyebarkan berbagai perkembangan informasi di bidang standardisasi kepada masyarakat; 2) Wadah komunikasi bagi para pengelola media informasi lingkup BSIP agar lebih inovatif dan kreatif dalam menyebarkan pemberitaan terkait hasil standar instrument pertanian. Pada saat seminar, narasumber menyampaikan beberapa strategi yang diperlukan dalam menyebarkan/promosi SNI diantaranya:

- Mengadakan Bulan Mutu Nasional 2023 sebagai upaya kolektif nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk dalam negeri di pasar lokal maupun mancanegara.
- Kolaborasi dengan berbagai stakeholder (kementerian. Akademisi, pelaku usaha)



Gambar 14. Seminar penyebarluasan Informasi Standar Nasional Indonesia

BSIP Pascapanen Menggelar Public Hearing Standar Pelayanan Publik

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BSIP Pascapanen Pertanian) menyelenggarakan Public Hearing secara hybrid di Aula Lantai 2 BSIP Pascapanen Pertanian, Rabu 27 September 2023. Public hearing sebagai upaya mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus untuk mendapat masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar standar pelayanan BSIP Pascapanen sesuai harapan pengguna layanan. Kegiatan ini dihadiri Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Zulkifli, Asisten Pencegahan Maladministrasi, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Maulana Ihsan, Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nuning Nugrahani, Sub Koordinator Hukum dan Organisasi Sekretariat BSIP Parlindungan Y Silitonga dan para pemangku kepentingan.

Public Hearing ini diikuti oleh lebih dari 80 peserta yang hadir baik secara daring maupun luring yang terdiri atas UK/UPT lingkup BSIP, perwakilan Ditjen Teknis Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jabar, Distan Kota dan Kabupaten Bogor, perwakilan dari IPB University dan Universitas Andalas Padang, Madrasah Aliyah Negeri 1 Kab. Bogor, Pelaku Usaha dan UMKM Binaan BSIP Pascapanen serta perwakilan dari Kelompok Tani Kota Bogor.



Gambar 15. Public Hearing Standar Pelayanan Publik

Kunjungan Dan Konsultasi Tentang Teknologi Pascapanen Pertanian

1. Menerima kunjungan dari Delegasi Fiji

Pada tanggal 25 Agustus 2023, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BSIP Pascapanen) menerima kunjungan Delegasi Fiji. Delegasi Fiji yang hadir terdiri dari Chief Executive Officer Itaukei Trust Fun Board (Mr. Aisake Taito), Bussiness Analyst Itaukei Trust Fun Board (Mr. James McGoon), Itaukei Land Trust Board (Mr. Solomoni Nata), Operation Manager Flour Mills of Fiji (Mr. Jumi Taniela), Duta Besar Fiji untuk Indonesia. Kunjungan bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pengolahan pati ubi kayu dan tepung ubi kayu yang telah dilakukan di Indonesia. Singkong merupakan salah satu umbi-umbian yang banyak dihasilkan di Fiji, namun pemanfaatannya masih kurang.

Pada kesempatan ini, Koordinator Program dan Evaluasi, Dr. Prima Luna menyampaikan presentasi mengenai cara pengolahan ubi kayu yang pernah dilakukan oleh BSIP Pascapanen diantaranya pengolahan tepung Modified Cassava Flour (Mocaf), tepung pregelatinisasi (Pregel), dan pengolahan tepung tapioka.



Gambar 16. Kunjungan Delegasi Fiji ke BSIP Pascapanen

2. Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Banten ke BSIP Pascapanen

Pada tanggal 3 November 2023, Komisi II DPRD Provinsi Banten yang membidangi Perekonomian sebanyak 13 orang melakukan kunjungan kerja ke Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Sereal, BSIP Pascapanen di Karawang. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka berkoordinasi terkait peran dan fungsi Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Sereal menghadapi isu-isu yang berkembang di masyarakat seperti beras sintetis dan isu perubahan iklim saat ini. Wakil Ketua Komisi II, H. Yoyon menyampaikan harapannya untuk mendapatkan informasi dan kiat-kiat terkait isu-isu tersebut.

Dengan tupoksi barunya BSIP Pascapanen, bersedia membantu pengujian terkait mutu beras untuk menghadapi isu-isu yang berkembang di masyarakat dengan mengacu kepada regulasi tentang mutu beras seperti SNI Beras, Permendag dan Permentan untuk mendeteksi kualitas dan mutu beras yang beredar di pasaran. Dalam kesempatan ini juga disampaikan berbagai peralatan yang tersedia di Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Sereal, diantaranya Rice Milling Unit, Line Process produksi biosilika sekam padi, fasilitas produksi biopellet dari jerami padi dan fasilitas produksi asap cair dari sekam padi.



Gambar 17. Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Banten ke BSIP Pascapanen

3. Kunjungan IPara A Qualidade de Timor Leste ke BSIP Pascapanen

Pada tanggal 7 Desember 2023, IPara A Qualidade de Timor Leste (IQTL IP) yang merupakan lembaga pemerintah otonom yang memiliki kewenangan terkait pengawasan mutu, standar dan metrologi mengunjungi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen (BSIP Pascapanen). Kunjungan dilakukan dalam rangka studi banding terkait pengelolaan sistem laboratorium di BSIP Pascapanen. Selama ini standar yang baru diterapkan di IQTL Timor Leste adalah ISO 17025. Pada kunjungan tersebut, delegasi melihat aktivitas dan peralatan laboratorium yang ada di BSIP Pascapanen yaitu laboratorium pengembangan dan kimia serta mengikuti kegiatan uji organoleptik beras dan kopi.



Gambar 18. Kunjungan IPara A Qualidade de Timor Leste

4. Kunjungan Tour Laboratorium

BBPSI Pascapanen mengadakan kegiatan Tour Laboratorium yang diperuntukan bagi pelajar, mahasiswa/i, atau masyarakat umum, baik grup maupun perorangan dengan tujuan mengenalkan kepada masyarakat terkait fasilitas laboratorium beserta pendukungnya. Dengan semakin banyak masyarakat yang mengetahui lab di lingkup BBPSI Pascapanen akan semakin banyak yang tertarik dan memanfaatkan laboratorium

sehingga akan memaksimalkan fungsi dan kemanfaatannya dalam pengembangan ilmu serta proses standardisasi bidang pascapanen pertanian.



Gambar 19. Kegiatan Tour lab

CODEX dan KOMITE TEKNIS

Rapat II Pembahasan Posisi Indonesia untuk Sidang CCPR ke-54

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian selaku Mirror Committee Codex Committee on Pesticide Residue melaksanakan Rapat II Pembahasan Posisi Indonesia untuk Sidang CCPR ke-54 di Avenzel Hotel, Cibubur pada 19-20 Juni 2023.

Kegiatan ini terdiri dari pemaparan tindak lanjut hasil Rapat pertama, dan penyusunan posisi Indonesia dalam Sidang CCPR ke- 54 yang akan dilaksanakan di Beijing China 26-1 Juli 2023. Dalam rapat ini dibahas beberapa agenda yang akan dibahas pada sidang diantaranya penetapan batas maksimum residu pestisida, klasifikasi komoditas pangan dan pakan untuk analisis residu pestisida, registrasi data base pestisida nasional, metode monitoring bahan aktif pestisida hingga percepatan prosedur operasional sidang serta isu-isu keamanan pangan terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Prima Luna mewakili Plt. Kepala BBPSI Pascapanen menegaskan perlunya penguatan kerjasama dan kolaborasi seluruh sektor terkait penanganan residu pestisida untuk menjamin mutu pangan dan kesehatan masyarakat.

Rapat ini juga dihadiri oleh Direktur Perumusan Standar Bapanas, serta perwakilan dari Direktorat Standardisasi Pangan Olahan-BPOM; Biro Kerjasama Luar Negeri-Setjen; Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan-Ditjen TP; Direktorat Perlindungan Perkebunan-Ditjen Bun; Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen Nak Keswan; Sekretariat BSIP; BB PSI Veteriner-BSIP; Laboratorium (BPMSPH-Dit. Kesmavet; BBPSI Lingkungan Pertanian-BSIP); Swasta (Crop Care; Crop life: Ex.director CropLife; PT.Syngenta, PT.Bayer; PT.BASF); dan Prof. Dr. Ir. Joni Munarso, MS sebagai pakar.

Delegasi RI pada Sidang CCPR ke-54 di Beijing

Selaku coordinator Mirror Committee Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR), Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mengirimkan Delegasi RI pada Sidang CCPR ke-54 di Beijing dari tanggal 26 Juni - 1 Juli 2023. Delegasi RI yang dikirimkan yaitu Prima Luna dari BSIP Pascapanen sebagai Ketua Delri, Kun Tanti dari BSIP Pascapanen, Emmy Susanti staf Kerjasama BSIP serta perwakilan dari Badan Pangan Nasional..

Sidang CCPR ke-54 ini dihadiri oleh 200 peserta dari 60 negara. Pada pertemuan kali ini ada beberapa isu yang dibahas yaitu tentang Etilen Oksida (Eto), revisi klasifikasi pangan dan pakan, penggunaan CRM serta pembahasan residu pestisida yang merupakan senyawa baru, senyawa yang ditarik serta yang tidak diatur lagi dalam standar. Selain itu koordinasi antara CCPR dan CCRVDF diperlukan untuk membahas senyawa yang memiliki dua kegunaan sebagai pestisida dan obat hewan dan kerja kolaborasi antara CCPR dan CCCF.

Sidang dibuka oleh Mr. Zhang Xingwang, Vice Minister at the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China dengan membahas 14 Agenda. Diantara 14 agenda, Indonesia telah aktif mengirimkan respon posisi Indonesia melalui Circular Letter (CL) dan Conference Room Document (CRD). Pada saat pembahasan agenda 4a, Indonesia menyampaikan posisi nya secara langsung oleh Prima Luna.

Ratek Perdana Komtek 65-22 Pascapanen Pertanian digelar BSIP Pascapanen

Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 337/Kep/BSN/9/2023, BSIP Pascapanen ditunjuk sebagai sekretariat Komisi Teknis 65-22 dengan ruang lingkup pengembangan standar di bidang pascapanen pertanian meliputi batas cemaran kimia pada hasil produksi budi daya pertanian. Standar yang dikembangkan mengacu pada ruang lingkup Codex Committee on Pesticide Residue (CCPR), tidak termasuk lingkup pengembangan standar metode pengujian pestisida, manajemen kehilangan hasil produksi budi daya pertanian serta penanganan pascapanen meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengelasan,

pengeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi pada hasil produksi budi daya pertanian.

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BSIP Pascapanen) menyelenggarakan rapat teknis Komite Teknis (Komtek) 65-22 Pascapanen Pertanian pada 19 Oktober 2023 di kantor BSIP Pascapanen, Bogor. Rapat teknis ini dibuka oleh Ketua Komtek 65-22 Pascapanen, Pertanian Husnain dan dihadiri oleh seluruh anggota Komtek 65-22 Pascapanen Pertanian serta tim sekretariat Komtek, yang dilaksanakan secara hybrid.

Anggota Komtek 65-22 ini melibatkan berbagai kalangan dari latar belakang berbeda-beda yaitu BSIP Pascapanen, Direktorat PPH Hortikultura, Direktorat Pupuk dan Pestisida (Pemerintah); BSIP Pascapanen, BSIP Lingkungan Pertanian, BBSPJIA Kemenperin, BPOM RI, IPB University (Pakar); Crop Life Indonesia, APTINDO/ Masyarakat Singkong Indonesia (Produsen); dan Universitas Trilogi, Asosiasi Beyond Moringa Indonesia, PT Sorga Sorgum Sejahtera (Konsumen).

Sekretariat Komtek 65-22 Pascapanen Pertanian akan mengusulkan empat Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) tahun 2024 yaitu Batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian, Metode pengukuran susut pascapanen padi, Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng dan Standar Penanganan Pascapanen Bawang Merah untuk Konsumsi.

PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI

TERSUSUNNYA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PASCAPANEN PERTANIAN

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor 13/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup BSIP, rancangan Dukungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) terhadap RPJM 2020-2024 pada Prioritas Nasional 1 (PN1) yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Program Prioritas (PP) pada PP3 yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dan PP6 Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi.

Program Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) terbagi 3 Program yaitu:

- Program 1: Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- Program 2: Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- Program 3: Dukungan Manajemen

BBPSI Pascapanen Pertanian melaksanakan mandat Program 1 yaitu Nilai Tambah dan Daya Saing dengan kegiatan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian serta Program 3 Dukungan Manajemen.

Target *Quick Win* (QW) BSIP 2023 adalah 1. Tersusunnya RSNI (24 RSNI3), Lembaga Sertifikasi Produk (LSPpro) (3 LSPPro), Tata Kelola UPBS (1 tata kelola) dan Pendampingan Penerapan Standar (2 pendampingan). Target *Quick Win* (QW) BBPSI Pascapanen Pertanian adalah 1 unit Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro).

Tersusunnya perencanaan program dan anggaran pascapanen pertanian tidak terlepas dari Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Penetapan Kinerja adalah 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi; 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dokumen PK BBPSI Pascapanen Pertanian TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12.Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan BBPSI Pascapanen Pertanian Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	4 Jumlah
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	2-1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	81.5 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	3-1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	86.5 Nilai

Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan 2023

Koordinasi merupakan salah satu alat untuk dapat melaksanakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama agar berjalan secara baik sesuai tugas dan wewenang masing-masing pihak terkait. Untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholder diperlukan koordinasi bersama unit kerja/pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian, Pemda Propinsi/Kabupaten, Kementerian terkait, bertujuan guna menyelaraskan kebutuhan standardisasi pascapanen. Beberapa kegiatan koordinasi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

Tabel 13.Rincian kegiatan sinkronisasi dan koordinasi

No	Jenis kegiatan koordinasi	Deskripsi hasil
	☐ Rapat Pimpinan lingkup BSIP	Rapat pimpinan atau rapat koordinasi dimaksudkan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan mensinkronkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi
	☐ Redesain Sistem	Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

No	Jenis kegiatan koordinasi	Deskripsi hasil
	Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)	(RSPP) merupakan suatu pendekatan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pemerintah pusat. Terbitnya Pepres Nomor 117 Tahun 2022 dan diikuti oleh Permentan Nomor 19 Tahun 2022 dan Nomor 13 Tahun 2023 kemudian diterjemahkan ke dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dalam pelaksanaan kegiatan - Program, Kegiatan, KRO dan RO BSIP: 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri: - Kegiatan 1: Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian KRO: Standardisasi Produk RO: Rancangan Standar Instrumen Pertanian - Kegiatan 2: Penguatan dan Layanan Penerapan Standar Instrumen Pertanian KRO: Kerja sama RO: Kerja sama Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian 2. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Kegiatan Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar - Kegiatan: Produksi dan Perbanyakan Benih/Bibit KRO: Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup RO: Benih Tanaman dan Bibit Ternak 3. Program Dukungan Manajemen - Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian
	☐ Koordinasi Permentan Revisi Standardisasi	Permentan Standardisasi Nomor 58 Tahun 2007 perlu direvisi dikarenakan sudah tidak relevan lagi dengan

No	Jenis kegiatan koordinasi	Deskripsi hasil
	tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian	susunan organisasi tatakerja (SOTK) Kementerian Pertanian dan perkembangan standar bidang pertanian
	☐ Harmonisasi Rancangan Pepres tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah mendorong tercapainya : 1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. 2. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 3. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Evaluasi dan pelaporan

a) BSIP Pascapanen Berkomitmen Melaksanakan SPIP Lebih Baik

Dalam penerapan SPIP, pada tahun 2023 telah dilaksanakan Sosialisasi SPIP untuk seluruh pegawai BBPSI Pascapanen Pertanian. Pelaksanaan sosialisasi dibuka oleh Plt.Kepala BBPSI Pascapanen Dr. Husnain, S.P., M.P., Ph.D. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi untuk membangun kesadaran seluruh pegawai BB pascapanen. SPI merupakan unsur yang diperlukan dalam reformasi birokrasi terutama dalam unsur pengawasan, setiap pegawai dapat melaporkan gratifikasi melalui unit UPG untuk dilaporkan ke BSIP dan itjen sehubungan pejabat fungsional yang sering mendapat honor sebagai narasumber di luar instansi agar dapat melaporkan gratifikasi ke unit UPG sebagai bentuk gratifikasi yang diperbolehkan. Salah satu kelemahan dalam penilaian SPI adalah penilaian manajemen risiko, Sub penilaian risiko saat ini menunjukkan nilai paling kecil diantara unsur SPI lainnya masih kurangnya penerapan manajemen risiko. Pada perpres 12 tahun 2020 secara tegas menyebutkan bahwa MRI harus ada di level 3 sebagai indikator capaian di setiap K/L, dengan adanya pengawalan dan pendampingan diharapkan para pejabat kegiatan mengetahui titik kritis dari probis kegiatannya agar output tetap tercapai, berharap pegawai seluruh pegawai mengetahui bagaimana mengelola risiko dan mengantisipasi serta memitigasi risiko yang dapat terjadi.

Paparan tentang sosialisasi MRI (Manajemen Risiko Indeks) yang terintegrasi dengan penilaian SPIP, Unit Pengelola Gratifikasi dan Pengaduan Masyarakat disampaikan oleh Inspektorat 4, Inspektorat Jenderal, Kementan 4 Drh, I.G.M Ngr. Kuswandara Dalam paparannya disampaikan bahwa Keberhasilan suatu organisasi unit kerja yang hebat ditentukan oleh manajemen , kontrol manajemen (SPIP), APIP. Jika manajer sudah baik, kontrol manajemen sudah jalan, dilakukan evaluasi terus menerus tidak perlu lagi di audit. Kegiatan SPI dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai, bagaimana cara membangunnya Exposure pengungkapan tidak ada efek jeranya, SPI dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pimpinan tidak mungkin bisa melakukan pengendalian ke semua lini oleh karenanya dibangun tools SPI.

Pengendalian risiko terintegrasi dengan manajemen risiko, risiko hanya bisa dikelola dan dikendalikan tidak bisa dihilangkan, risiko yang paling tinggi ada pada kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Gratifikasi diatur di dalam UPG, ada gratifikasi yang tidak boleh dan ada yang boleh. Gratifikasi yang tidak boleh yang bersifat kedinasan, yang diperbolehkan bersifat asenda. Supaya pemberian tidak menjadi gratifikasi maka harus dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari,

jangan dibawa pulang, dibersifat umumkan. Gratifikasi dalam kedinasan adalah honorarium, hadiah, tidak boleh melebihi pagu dan sesuai SBM.



Gambar 20. Sosialisasi SPI

b) Penyusunan Laporan Bulanan UK/UPT TA. 2022

Selama periode Januari s.d Desember 2023, telah disampaikan 12 (dua belas) laporan bulanan kegiatan BB Pascapanen sebagai laporan kegiatan lingkup BBPSI Pascapanen. Laporan bulanan unit kerja mencakup kegiatan diseminasi, kerjasama dan kemitraan, serta manajemen. Hasil kegiatan BSIP Pascapanen yang telah dilaporkan periode Januari–Desember 2023. Secara lengkap, hasil kegiatan tersebut tertuang dalam *“Laporan Bulanan BBPSI Pascapanen”*.

c) Penyusunan Laporan Triwulan TA. 2023

Penyusunan laporan triwulan TA 2023 dilakukan dengan mengumpulkan perkembangan kegiatan Teknis dan manajemen dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk direkapitulasi dan disampaikan ke BSIP. Bahan laporan Triwulan I, II, III dan IV terdiri dari: (1) Perkembangan kegiatan teknis TA. 2023; (2) Perkembangan kegiatan utama; (3) Rencana Aksi Kinerja berdasarkan PK es. 1/2021: untuk IKU 1 Balitbangtan (rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap yang didiseminasikan), diseminasi dan pemanfaatan dianggap selevel, jika sudah didiseminasikan berarti dianggap sudah dimanfaatkan; (4) Laporan Bulanan kegiatan Balai; (5) Laporan SPI; (6) Laporan DUMAS; (7) Laporan Gratifikasi; (8) Updating data: e-monev Bappenas, PMK 22/2021, e-monev BSIP, dan e-sakip.

d) Penyusunan Laporan Sub-UPG TA.2023 (SPI)

Sampai dengan semester IV (bulan Januari – Desember) tahun 2023 Sub Unit Pengelola Gratifikasi BBPSI Pascapanen menerima satu laporan gratifikasi dari pejabat struktural pegawai BSIP Pascapanen dan sudah ditindaklanjuti serta diserahkan ke KPK.

Rendahnya laporan gratifikasi di tahun 2023 dikarenakan kesadaran pegawai untuk melaporkan terkait gratifikasi masih rendah, kekurangpahaman pegawai terhadap bentuk dan jenis gratifikasi, maka Sub Koordinator evaluasi telah mengingatkan baik melalui wa grup maupun surat resmi kepada pegawai agar dapat melaporkan terkait gratifikasi.

e) Penyusunan Laporan Tengah Tahun Sub Koordinator Evaluasi TA. 2023

Laporan tengah tahun Sub Koordinator evaluasi telah disusun yang berisi kegiatan tugas pokok selama satu semester yang dilaksanakan oleh Sub Koordinator evaluasi mulai bulan Januari – Juni 2023.

f) Penyusunan Laporan Dumas TA. 2023

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengelolaan Dumas di BBPSI Pascapanen periode Januari s.d Desember tahun 2023, terdapat pengaduan terkait Pelayanan Publik teknis maupun administratif sebanyak 9 aduan kerusakan yang didominasi oleh pengaduan internal seperti kerusakan alat laboratorium ke BBPSI Pascapanen melalui website, telepon dan SMS, maupun kotak saran.

g) Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja sudah disusun dan telah dilakukan evaluasi silang. Pada Renstra 2023-2024, BBPSI Pascapanen Pertanian telah menetapkan tiga sasaran yang akan dicapai beserta masing-masing indikator sasaran/kinerjanya. Untuk sasaran pertama “Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian” telah berhasil diperoleh 4 RSNI3. Capaian tersebut sesuai dengan target, tercapai 4 RSNI3 (100%) dari target 4 RSNI3. Dengan demikian, sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian” tahun 2023 telah tercapai dengan kategori berhasil.

Sasaran kedua BBPSI Pascapanen Pertanian, “Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima” sudah tercapai pada tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dari nilai ZI yang cukup tinggi diraih pada tahun ini, yaitu 89,28 dari target 81,5 tercapai diatas target (109,55%), nilai tersebut juga meningkat dibandingkan tahun lalu, sekitar 2,87 poin.

Sasaran ketiga BB Pascapanen, “Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas”, dengan indikator sasaran nilai kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian (berdasarkan regulasi/PMK yang berlaku), tercapai (98,57%) dari target 86,5 tercapai 85,26. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam

mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia sebagai penghasil teknologi, sumberdaya sarana dan prasarana penelitian serta sumberdaya anggaran

h) Penyusunan Laporan Tahunan

Laporan tahunan BBPSI Pascapanen Tahun 2023 berisi uraian capaian kinerja kegiatan BBPSI Pascapanen TA. 2023. Selama tahun 2023, BBPSI Pascapanen telah mencatat sejumlah capaian dalam merealisasikan tugas tersebut, dilihat dari jumlah RSNI 3 yang dihasilkan, pembentukan LSPro serta Inkubator bisnis. Dalam laporan terlihat pula empat RSNI 3 yang telah dihasilkan, tiga rekomendasi kebijakan dan kegiatan manajemen yang mendukung tercapainya kinerja BBPSI Pascapanen. Dalam laporan tahunan dilaporkan hasil kegiatan BBPSI Pascapanen pada tahun 2023 berdasarkan DIPA tahun tersebut.

PENUTUP

Keberhasilan pencapaian di tahun 2023 tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang ditargetkan 4 Rancangan, sampai dengan akhir November 2023 telah diperoleh 4 RSNI 3 yang telah disampaikan ke BSN untuk diproses menjadi SNI. Publikasi banyak dilakukan di media online dan media sosial, sesuai perkembangan jaman yang sedang tren saat ini. Kegiatan tersebut diharapkan terus ditingkatkan kualitasnya sehingga efektivitas kegiatan diseminasi dapat tercapai. Dampak dari kegiatan diseminasi terlihat dengan semakin meningkatnya, kunjungan, bimbingan teknis/pelatihan dan magang teknologi, serta pengiriman publikasi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi BBPSI Pascapanen, telah dilakukan peningkatan kompetensi pegawai sesuai bidang tugas, aplikasi e-personal, , sarana dan prasarana termasuk fasilitas laboratorium dan perbaikan website terutama tampilan dan up-dating informasinya. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan kegiatan di BBPSI Pascapanen ke depan lebih kondusif sehingga dapat memacu peningkatan kinerja.

Dengan terbitnya DIPA yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan pada tanggal 30 Nopember 2022 Balai Besar Pengujian Standarisasi Instrumen Pascapanen Pertanian sesuai surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP-DIPA - 018.09.2.648669/2023, memiliki pagu anggaran sebesar Rp16.465.917.000,-. Selama TA. 2023, sampai dengan akhir Desember 2023, DIPA BBPSI Pascapanen mengalami revisi sebanyak 13 kali, sehingga anggaran terakhir di BB Pascapanen pada tahun 2023 senilai Rp 17.773.846.000,-.

Adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan untuk diatasi, dan langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut dapat dijadikan langkah antisipatif dalam mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi pada pelaksanaan kegiatan tahun mendatang.



**Jalan Tentara Pelajar no.12, Cimanggu
Bogor, 16114
Telp. (0251) 8321762**